

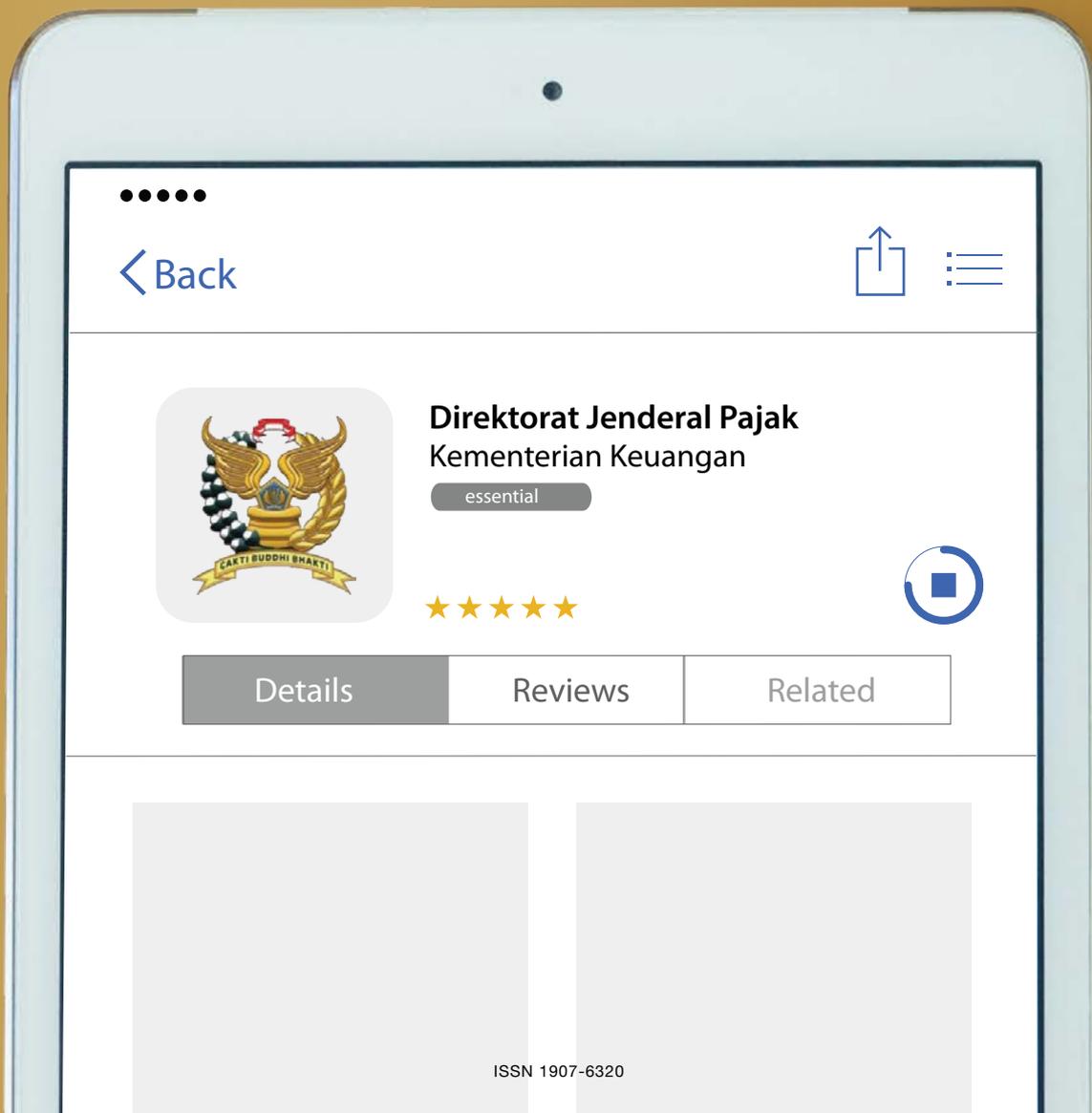


MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

SEMANGAT PERBAIKAN

Menteri Keuangan membentuk tim reformasi perpajakan yang akan bekerja hingga 2020. Tiga tujuan dicanangkan: peningkatan kepatuhan wajib pajak, kepercayaan terhadap pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan, serta integritas dan produktivitas aparat perpajakan.



Daftar Isi



Foto Cover
Anas Nur Huda

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulastuti. **Dewan Redaksi:** Titi Susanti, Rezha S. Amran, Budi Sulisty, Wahyuni Septianingsih, Purwo Widiarto, Rynalto Mukiwihando, Hadi Surono, Ali Ridho, Diah Sarkorini, Sri Moedji Sampurnanto, M. Multhazam, Pilar Wirotama, Muchamad Ardani, Adya Asmara Muda, Agung Sudaryono. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Joko Triharyanto, Sugeng Wistriono, Panji Pradana Putra, Andi Abdurrochim, Ferdian Jati Permana, Andini Oktaviani, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Ridwan Sidik Kurniawan, Nur Iman, Adik Tejo waskito, Nur Muhlisin, Citra Handayani, Fitri Kurniawati, Shinta Septiana. **Redaktur Foto:** Gathot Subroto, Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Anggar Rindra Wijaya Putra, Rhoric Andra Fahreza, Andi Al Hakim, Adhi Kurniawan, F. Edy Santoso, Arief Kuswanadji, Muhammad Fath Kathin, Muchamad Ardani, Ardhan Dharna Yudha. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

LAPORAN UTAMA

- 13 Semangat Perbaikan dalam Tim Reformasi Perpajakan
- 16 Infografis
- 18 Amnesti Pajak, Jembatan Reformasi Perpajakan
- 21 Modernisasi Teknologi Informasi Untuk Pajak
- 23 Reformasi adalah Kekarifan

REPORTASE

- 25 Menkeu Hadiri Peluncuran fasilitas KITE untuk IKM
- 26 Menkeu Tinjau Pembangunan Tol Semarang-Solo

WAWANCARA

- 27 Cara Risma Memimpin Surabaya

POTRET KANTOR

- 30 Torehan Prestasi dari Ujung Timur Jawa

FIGUR

- 32 Merantau Demi Ilmu Baru

EKONOMI TERKINI

- 36 Infrastruktur yang Mendorong Pemerataan Ekonomi

KOLOM EKONOM

- 40 Menyelesaikan Persoalan Keuangan Daerah

GENERASI EMAS

- 44 Menjadi Alumni yang Berkontibusi

OPINI

- 46 Reformasi Perpajakan untuk Bisnis Teknologi Informasi

REGULASI

- 48 Kemenkeu Naikkan Santunan Korban Kecelakaan Hingga 100%

INSPIRASI

- 50 Musisi yang Terlahir dari Kanal Youtube

RENUNGAN

- 52 Menambah Makna dalam Kehidupan

BUKU

- 53 Tere Liye: Tentang Kamu

KULINER

- 54 Mencicip Kuliner Banjar Di Tepi Sungai

SELEBRITI

- 56 Berawal Dari Tulisan, Kini Jadi Penghasilan



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

Media Keuangan Edisi Juni 2016

Gold Winner

The Best of e-Magazine (InMA) 2017



Media Keuangan Edisi Agustus 2016

Gold Winner

The Best of Inhouse Magazine (InMA) 2017

Reformasi Perpajakan Maksimalkan Penerimaan

Bulan Maret tahun ini terasa berbeda bila dibandingkan dengan bulan Maret di tahun-tahun sebelumnya. Alasannya, tanggal 31 Maret 2017 adalah periode akhir amnesti pajak yang juga bertepatan dengan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, *tax ratio* kita semakin menurun. Bahkan dalam dua tahun terakhir *tax ratio* kita berada di bawah 11 persen. Sementara, seperti yang kita tahu, pembangunan dalam negeri meningkat pesat. Akibatnya, tambahan sumber dana untuk pembangunan nasional menjadi kebutuhan yang mendesak. Berangkat dari alasan tersebut, maka dibuatlah terobosan untuk

meningkatkan penerimaan pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali bertekad untuk mereformasi perpajakan. Akhir tahun 2016, Menkeu membentuk Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Pelaksanaan reformasi melalui kedua tim ini mencakup mencakup organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan.

Pembentukan tim reformasi perpajakan melibatkan berbagai kalangan, seperti pengusaha, pengamat, akademisi, praktisi, tenaga ahli, serta pelaku usaha dan wartawan. Hal ini diperlukan karena reformasi pajak tidak bisa berjalan sendiri.

Program amnesti pajak diharapkan menjadi langkah awal reformasi perpajakan. Perluasan basis data (*tax base*) yang diperoleh dari program amnesti pajak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan penerimaan pajak. Apalagi setelah penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI), wajib pajak (WP) bisa membayar pajak berdasarkan jumlah yang sesuai dengan kewajibannya (*fair-share*).

Reformasi perpajakan yang akan dilakukan ini diarahkan salah satunya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan *tax ratio* sesuai dengan yang diharapkan, yaitu 14 persen di tahun 2019. Momentum reformasi ini merupakan babak baru penegakan hukum yang lebih berkeadilan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Tim Reformasi Perpajakan memiliki beberapa langkah inisiatif untuk meningkatkan *tax ratio*. Pertama, Pengawasan berupa peningkatan efektivitas pemungutan pajak. Kedua, Penegakan Hukum berupa fokus pemeriksaan pada WP. Ketiga, Pelayanan dengan mempermudah layanan kepada WP. Sampaikan semangat dan optimisme teman-teman untuk Sistem Perpajakan Indonesia yang lebih baik

Apritama Nur
@apri_enha
Menjadikan sistem perpajakan akuntabel, kredibel, dan dapat dipercaya sehingga meningkatkan *tax ratio*.

Benardo Partogi
@benardopartogi
Optimis dengan transparansi yang diberikan dalam penggunaan pajak, dapat meyakinkan WP utk bayar pajak

Dony Saputro
@DonyAze
Sangat Optimis, dgn Program Tax Amnesty, kedepannya Basis Data Perpajakan akan sangat baik untuk Penggalan Potensi



tweet



Peninjauan Lapangan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan peninjauan pembangunan jalan tol Semarang-Solo di Seksi III Bawen-Salatiga yang direncanakan dibangun sepanjang 17,60 km pada Jumat (17/2). Pemerintahan Presiden Jokowi memberikan perhatian serius pada program pembangunan infrastruktur dan berkomitmen menambah alokasi anggarannya dalam APBN.

Foto
Langgeng W.P.



Kerajinan Lokal Tembus Pasar Internasional

Jika Anda berkunjung ke Purwakarta, Jawa Barat, jangan lupa membeli oleh-oleh keramik di sentra kerajinan Plered. Kawasan ini sudah terkenal sebagai sentra industri keramik dan tembikar. Selain pembeli dalam negeri, hasil kerajinan dari Plered juga laris terjual di pasar internasional.

Foto
Tino Adi P.



31/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

LPDP Edufair 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka acara LPDP Edufair 2017 di Aula Dhanapala Jakarta, kementerian Keuangan pada Selasa (31/01). Menkeu berharap, dengan semakin meningkatnya jumlah *awardee* LPDP akan dapat membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. “Banyak negara-negara di ASEAN yang mampu sekolahkan masyarakat secara umum maupun orang-orang di birokrasinya ke sekolah-sekolah terbaik di dunia, karena mereka ingin membuat negaranya menjadi negara yang hebat,” tegasnya. Kegiatan LPDP Edufair 2017 ini juga dilakukan di kota Surabaya (02/02) dan Yogyakarta (04/02).



03/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Media Keuangan Raih Dua Penghargaan di Ajang InMa 2017

Media Keuangan kembali raih penghargaan Gold Winner dalam ajang The 6th SPS Inhouse Magazine Awards (InMa) tahun 2017 pada Jumat (03/02) dalam kategori Lembaga Pemerintah Pusat. Penghargaan diberikan untuk kompetisi dua sampul muka (*cover*) terbaik, baik majalah cetak maupun majalah digital. Media Keuangan dinilai paling menonjol dalam menyajikan sampul muka yang menarik untuk edisi Juni 2016 (versi digital) dan edisi Agustus 2016 (versi cetak). Penghargaan diserahkan langsung oleh Alwi Hamu, pemimpin harian FAJAR sekaligus pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti.



23/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Lantik 2 Pejabat Eselon 1

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik dua pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di Aula Djuanda Lantai Mezzanine Gedung Djuanda I. Adapun pejabat Eselon I yang dilantik adalah Sumiyati sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPPK dan Astera Primanto Bhakti sebagai Kepala BPPK setelah sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Kemenkeu. Menkeu berharap untuk jajaran pejabat yang dilantik menjadi pemimpin dan manager yang menjalankan fungsi secara loyal, dedikatif dan penuh integritas.



27/01

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kontrak Kinerja, Komitmen Kementerian Keuangan Bekerja untuk Bangsa

Menkeu beserta seluruh pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penandatanganan Komitmen Kinerja serta Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu-Wide dan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One Tahun 2017 di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jumat (27/01). Kegiatan Penandatanganan Komitmen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan ini merupakan perwujudan komitmen para pimpinan di lingkungan Kemenkeu untuk mencapai kinerja target kinerja tahun 2017 yang dituangkan dalam bentuk Komitmen Kinerja dan Kontrak Kinerja.

09/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

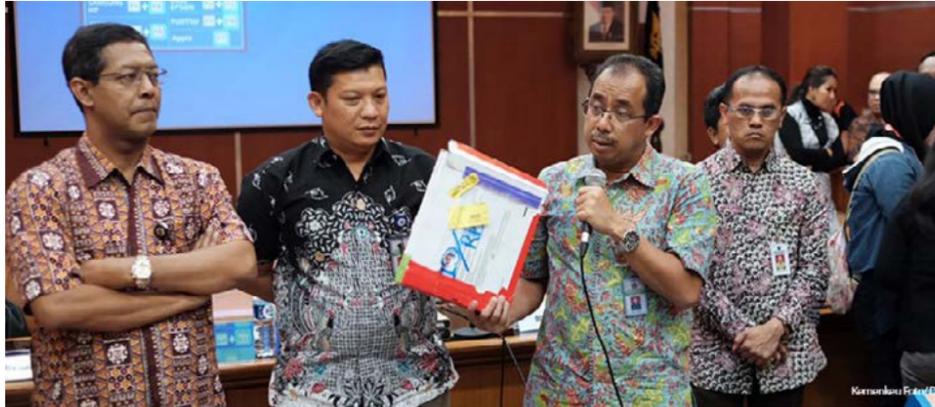


Menkeu Serahkan 107 Nama Calon DK OJK

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyati Indrawati selaku Ketua Panitia Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Pansel DK OJK) menyerahkan secara simbolis kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo daftar nama 107 calon anggota beserta seluruh data pribadi termasuk data anggota keluarga. Hal ini disampaikan Menkeu pada konferensi pers di kantor KPK pada Kamis (09/02).

Agenda

- 1/03 Farewel Amnesti Pajak (info bahwa *amnesty* pajak akan segera berakhir) di Kemayoran.
- 3-14/03 Roadshow Global Bond bersama Menteri Keuangan di USA dan Hongkong.
- 6/03 Keynote Speaker UBS Indonesia Investor Conference 2017 di Hotel Mandarin.
- 8/03 Jakarta Forum di Bandung.
- 15-24/03 Roadshow Sukuk Global 2017 di Kuala Lumpur, London, Middle East.
- 23/03 Meeting dengan Investor Deutsche Bank di Jakarta.



10/02

Konferensi Pers Temuan KTP dan NPWP dari Kamboja

Teks
Biro KLI

Foto
DJBC

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi bersama Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil mengadakan konferensi pers yang digelar pada Jumat (10/02) di Kantor Pusat Bea Cukai terkait temuan KTP, NPWP, Buku tabungan dan ATM dari Kamboja. “Khusus temuan KTP ini, kami tengah berkoordinasi secara intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang tersebut. Kalau melihat ada KTP, NPWP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM, bisa jadi pengiriman paket ini terkait dengan kejahatan ekonomi misalnya kejahatan siber, kejahatan perbankan, judi online, narkoba, prostitusi, dan pencucian uang,” ujarnya.



16/02

Teks
Biro KLI

Foto
DJPPR

Premarketing Sukuk Ritel Seri SR-009

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan melaksanakan kegiatan DJPPR Goes to Campus & Pre Marketing Sukuk Ritel Seri SR-009 Tahun 2017 dengan tema “Peran Keuangan Syariah untuk Mewujudkan Akselerasi Pembangunan Nasional” di Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur pada Kamis (16/02). Acara ini dihadiri oleh para stakeholder dari kalangan akademisi dan praktisi keuangan syariah. Sukuk Ritel seri SR-009 merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang diterbitkan pemerintah dan akan dipasarkan mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 17 Maret 2017 dengan jangka waktu 3 tahun, dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable), dan dapat dibeli minimal sebesar Rp 5 juta dan maksimal Rp 5 Miliar.

16/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

APBN Instrumen untuk Mencapai Tujuan Pembangunan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum dengan tema “APBN yang Efektif dan Kredibel untuk Membangun Negeri” di Gedung Prof. Soedarto, SH Tembalang Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada Kamis (16/02). Dalam kuliahnya, Menkeu menjelaskan mengenai fundamental ekonomi Indonesia dan tatanan pembangunan, APBN sebagai suatu instrumen pendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia; APBN sebagai instrumen dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia; dan kebijakan lainnya dalam pengelolaan ekonomi Indonesia.



Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membentuk tim reformasi perpajakan pada Desember 2016. “Tujuan dari tim reformasi adalah untuk membangun institusi pajak dan bea cukai yang kredibel, bisa dipercaya publik, dan mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan konstitusi dan undang-undang,” kata Menkeu pada *kick-off meeting* sekaligus peluncuran tim reformasi yang diselenggarakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Selasa (20/12). Tiga tugas yang dimaksud Menkeu meliputi mengumpulkan penerimaan negara, menciptakan kepastian usaha, dan melayani

masyarakat dengan profesionalisme, integritas, dan efisiensi yang tinggi. Di samping tim reformasi perpajakan, Menkeu juga membentuk tim penguatan reformasi kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan reformasi melalui kedua tim ini mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundangan-undangan. Dari sisi perpajakan, pembentukan tim reformasi ini berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP), meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan, serta meningkatkan integritas serta produktivitas aparat perpajakan. Sementara itu, dari sisi

kepabeanan dan cukai, pembentukan tim reformasi berguna untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan, terdapat empat bagian dalam tim ini, yaitu tim pengarah, tim advisor, tim observer, dan tim pelaksana. Menkeu sendiri bertindak sebagai Ketua Tim Pengarah. Sementara tim penguatan reformasi kepabeanan dan cukai dibentuk berdasarkan KMK Nomor 909/KMK.04/2016 tentang Pembentukan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Tim penguatan reformasi

Tim reformasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kepercayaan terhadap pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan, serta integritas dan produktivitas aparat perpajakan.

Foto
Paruhum A.S. Hutaeruk

kepabeanaan dan cukai memiliki dua kelompok kerja, yaitu kelompok kerja bidang organisasi dan SDM dan kelompok kerja bidang peraturan perundang-undangan. Kelompok pertama memiliki fokus pada penataan organisasi Bea dan Cukai yang *best fit*, perencanaan kebutuhan SDM, penerapan *code of conduct* dan sistem kepatuhan untuk menjaga integritas dan disiplin pegawai Bea dan Cukai, revitalisasi infrastruktur pelayanan dan pengawasan, serta sistem penganggaran berbasis kinerja dalam rangka menjaga *good governance*. Sementara kelompok kedua melakukan evaluasi terhadap peraturan agar lebih implementatif dengan tetap mendukung iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan *multiplier effect* lainnya demi pertumbuhan ekonomi. Proses bisnis dan teknologi informasi juga akan dilakukan penataan dengan menyusun kebijakan dan sistem informasi berbasis teknologi yang mendukung upaya pemberantasan penyelundupan dan pemberantasan korupsi dan pungli.

Pada tim reformasi perpajakan, tim pengarah bertugas untuk memberikan pengarah dalam menetapkan kebijakan untuk mempersiapkan dan melaksanakan reformasi atas aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, dan teknologi informasi kepada tim pelaksana. Di samping itu, tim pengarah juga bertugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

Selanjutnya, tim advisor bertugas untuk memberikan

masukan dalam rangka reformasi berdasarkan teori dan keilmuan. Di sisi lain, tim observer bertugas untuk melakukan pengamatan dan memberikan masukan sesuai dengan latar belakang dan pengalaman dalam bidang yang dikuasainya. Kemudian, tim pelaksana mempunyai tugas untuk mengoordinasikan penyusunan arah dalam cakupan aspek organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, dan teknologi informasi; mengoordinasikan penyiapan landasan hukum dan harmonisasi regulasi serta perumusan bentuk koordinasi kebijakan pengelolaan fiskal; dan mengoordinasikan hal-hal yang memiliki inisiatif startegis. Yang juga menjadi catatan, tim observer bertugas melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh tim pengarah untuk memonitor dan melakukan evaluasi reformasi.

Pembentukan tim reformasi perpajakan melibatkan banyak pihak di dalamnya, yaitu akademisi, praktisi, tenaga ahli, Komite Pengawas Perpajakan, serta pelaku usaha dan wartawan. Mereka dilibatkan dalam keanggotaan tim reformasi sebagai tim advisor dan observer.

Tim pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan arah reformasi perpajakan yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundangan-undangan. Tugas berikutnya adalah mengoordinasikan penyiapan landasan hukum dan harmonisasi

regulasi serta perumusan bentuk koordinasi kebijakan pengelolaan fiskal. Di samping itu, tim pelaksana juga mengoordinasikan inisiatif-inisiatif strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi perpajakan serta melaksanakan perumusan kebijakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh ketua tim pelaksana terkait monitoring dan evaluasi program reformasi perpajakan.

Semangat perbaikan

Dalam wawancara dengan Media Keuangan di kantor pusat DJP di Jakarta, Kamis (16/2), Ketua Tim Pelaksana Reformasi Perpajakan Suryo Utomo mengatakan bahwa secara umum ada tujuan utama pembentukan tim, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, tujuan tim reformasi perpajakan difokuskan pada pencapaian target penerimaan, sedangkan pada jangka panjang, tim refomasi perpajakan diarahkan pada segala upaya yang menyangkut perbaikan organisasi.

“Kami membuat desain dan langkah-langkah strategis, termasuk juga melakukan perbaikan organisasi, untuk tujuan mencapai penerimaan,” kata Suryo. Menurut dia, tim reformasi tidak hanya ingin menyentuh kalangan internal, melainkan juga menaikkan kepercayaan publik terhadap DJP. Tim reformasi dibuat besar dan melibatkan berbagai kalangan karena urusan perpajakan bersifat multidimensional. Suryo memberikan contoh peran praktisi media yang juga dilibatkan sebagai tim observer. “Dari wartawan misalnya, kami ingin mengetahui pandangan publik terhadap DJP.

"Kami membuat desain dan langkah-langkah strategis, termasuk juga melakukan perbaikan organisasi, untuk tujuan mencapai penerimaan."

Suryo Utomo Ketua Tim Pelaksana Reformasi Perpajakan

Jadi bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki diri berawal dari pemahaman berbagai pihak,” lanjut Suryo.

Sementara itu, kehadiran pengamat perpajakan di dalam tim diharapkan dapat memberikan perspektif sesuai keahlian, misalnya tentang perbaikan sistem perpajakan, termasuk perbandingan sistem perpajakan di berbagai negara lain. “DJP tidak bisa jalan sendiri. Kami ingin bagaimana membuat wajib pajak juga memiliki kepercayaan dalam menjalankan kewajibannya,” lanjut Suryo yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak tersebut.

Menurut Suryo, Menkeu memberikan perhatian yang tinggi terhadap kinerja tim reformasi perpajakan. Tim memberikan laporan kepada Menkeu tentang progress kinerja setiap bulan. Suryo menambahkan reformasi di DJP dilakukan secara berkelanjutan mengikuti tantangan perkembangan zaman. “Contohnya sekarang sudah ada *e-commerce*. Dengan berubahnya model transaksi jual beli, proses bisnis pun harus berubah. *Nah* itu yang menyebabkan *reform* di DJP itu perlu,” ungkap Suryo.

Reformasi perpajakan juga bisa dikaitkan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di DJP. Peningkatan jumlah WP sejalan dengan pola transaksi yang bertambah. “Mau tidak mau, SDM di DJP juga harus disesuaikan kemampuan, jumlah, dan penempatannya. Itu perlu direformasi lagi,” ujar Suryo.

Amandemen RUU Perpajakan

Tim Reformasi Perpajakan juga

terlibat dalam upaya perbaikan aturan perpajakan melalui amandemen undang-undang perpajakan setelah berakhirnya periode pemberlakuan kebijakan amnesti pajak. “Kami sudah mulai jalan proses amandemen Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). Mudah-mudahan bisa didiskusikan dengan DPR,” kata Suryo.

Menurut Suryo, amandemen UU KUP akan mendorong perubahan banyak proses perpajakan. “Harapannya dengan perubahan UU KUP, organisasi menjadi lebih efektif dan mempunyai daya penegakan hukum yang sesuai,” ujarnya. Sementara terkait dengan amandemen undang-undang lain seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), pembahasan perubahannya juga terus dilakukan. “Jadi itulah mengapa kami membutuhkan observer. Mereka bisa melihat, misalnya, UU PPN tidak cocok dengan model yang sekarang ada. Ini yang kami diskusikan,” kata Suryo. Dalam tim reformasi perpajakan, anggota tim observer bahkan juga melibatkan perwakilan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund, dan Organisation for Economic Co-operation and Development. Kehadiran perwakilan organisasi internasional diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap implementasi aturan perpajakan di berbagai negara yang dapat dijadikan *benchmark* oleh DJP.

Peningkatan rasio pajak

Ditemui setelah menjadi pembicara pada diskusi bertajuk

“Perpajakan 2017: Pasca Tax Amnesty, What’s Next?“, Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menyatakan dukungannya pada upaya pemerintah dan DPR untuk melakukan serangkaian amandemen pada aturan perpajakan. “Proses reformasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan merevisi undang-undang di bidang perpajakan, seperti UU KUP, UU PPN, UU PPh, dan lainnya,” kata Yustinus.

Yustinus juga mendukung langkah pemerintah untuk mewujudkan *comprehensive tax reform* melalui tm reformasi perpajakan. Menurut Yustinus—yang juga anggota Tim Advisor—selama ini reformasi perpajakan selalu dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, dengan jangka waktu tugas hingga 2020, tim reformasi perpajakan diharapkan dapat mewujudkan reformasi yang menyeluruh.

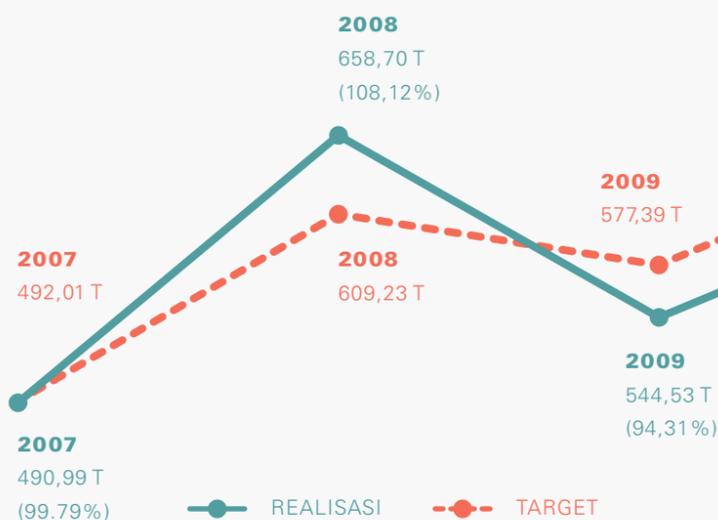
Menurut Yustinus, salah satu fokus yang disampaikan Menkeu kepada anggota tim reformasi perpajakan adalah peningkatan *tax ratio* dari 11 persen menjadi 15 persen pada 2020. Oleh karena itu, Yustinus mendorong dikeluarkannya terobosan-terobosan baru dalam pendekatan kepada masyarakat. Dia mengapresiasi upaya DJP meningkatkan kemudahan pelaporan pajak melalui *e-filing*. “Digitalisasi baik, tapi tidak cukup. Program terobosan yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan integrasi data. Setelah data terkumpul, DJP harus tahu apa yang akan dilakukan dengan data itu,” kata Yustinus.

Di samping itu, sebagai anggota tim reformasi perpajakan, Yustinus juga akan membawa usulan agar DJP melakukan pendekatan secara indisipliner kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan. Yang juga tak kalah penting menurut Yustinus adalah perlunya DJP mengukur keberhasilan literasi pajak di masyarakat. DJP dapat melakukan pengukuran ini dengan berangkat dari data bahwa para peserta amnesti pajak sebagian besar adalah masyarakat yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di ujung wawancara, Yustinus mengingatkan perlunya pemerintah menyiapkan strategi *second best option* sebagai pelapis berbagai rencana kerja yang telah ditetapkan oleh tim reformasi perpajakan.

_____ **Teks** Dwinanda Ardhi

Mereformasi Pajak, Mereformasi Masa Depan

Peran pajak bagi sumber penerimaan dan pembangunan negara demikian dominan. Realisasi penerimaan pajak sesuai target terus diupayakan. Aspek organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, hingga teknologi informasi dibenahi melalui pembentukan **Tim Reformasi Perpajakan**. Berbagai pihak dilibatkan dalam tim, mulai dari akademisi, praktisi, tenaga ahli, Komite Pengawas Perpajakan, pelaku usaha, hingga wartawan.



Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia
Tahun 2007-2017

Tim Reformasi Perpajakan

DASAR HUKUM

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan (Tim Reformasi).

MAKSUD

Mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan, mencakup aspek:

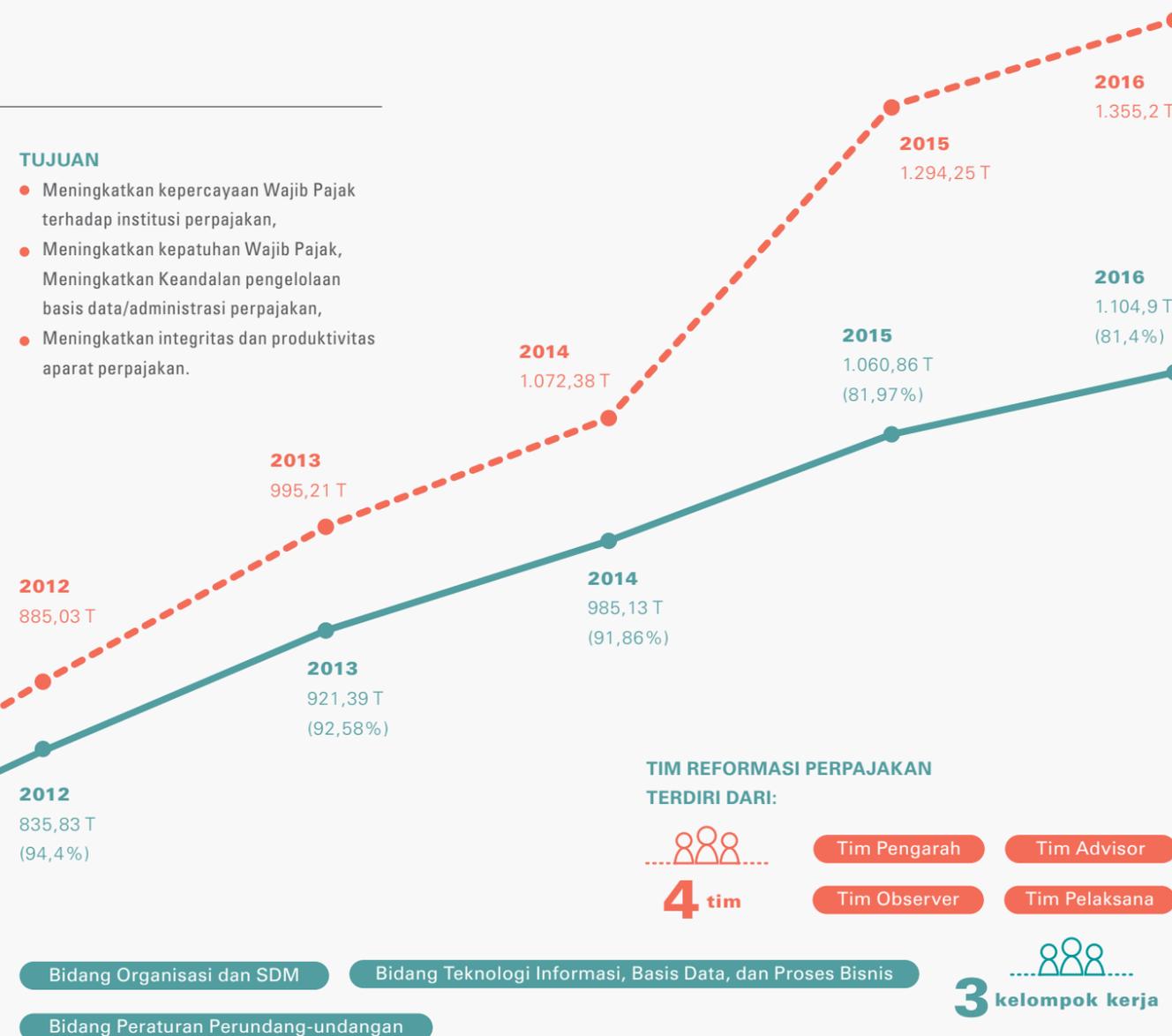
- Organisasi dan sumber daya manusia,
- Teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta
- Peraturan perundang-undangan.

TUJUAN

- Meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap institusi perpajakan,
- Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Meningkatkan Keandalan pengelolaan basis data/administrasi perpajakan,
- Meningkatkan integritas dan produktivitas aparat perpajakan.

REGULASI YANG DIREVISI SEBAGAI BAGIAN TUGAS TIM REFORMASI:

- UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU Pajak Penghasilan
- UU Pajak Pertambahan Nilai
- UU BeaMaterai



TIM REFORMASI PERPAJAKAN TERDIRI DARI:



Tax Ratio* Indonesia



*tax ratio dalam arti sempit

Konektivitas dan Komitmen Kerja Sama Internasional



Konektivitas dukungan terhadap informasi perbankan (amandemen UU Perbankan)



Konektivitas pembangunan teknologi informasi dengan ketersediaan data dan informasi kepada publik



Kerja sama internasional khususnya kelanjutan komitmen Automatic Exchange of Information (AEOI) dengan negara-negara G20

Amnesti Pajak, Jembatan Reformasi Perpajakan



Foto
Anas Nur
Huda

Perjuangan untuk membangun perpajakan yang lebih baik belum surut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkomitmen untuk melanjutkan reformasi perpajakan kembali. Kali ini, Menkeu melakukannya dengan membentuk Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Tim tersebut ditugaskan untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan penguatan reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pelaksanaan reformasi melalui kedua tim ini mencakup mencakup organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan.

Momentum reformasi ini dilakukan bertepatan dengan kebijakan amnesti pajak yang telah diluncurkan sebelumnya. Menurut Menkeu, program amnesti pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak di satu sisi dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di sisi yang lain. Untuk menyukseskan hal tersebut, lanjutnya, reformasi pada tubuh DJP mutlak diperlukan. Tujuannya adalah untuk membangun budaya membayar pajak yang diikuti dengan meningkatnya kepatuhan dari Wajib Pajak (WP). "Mereformasi DJP untuk menjadi institusi yang disegani, dihormati, dipercaya, itu adalah suatu perjalanan yang harus terus menerus diupayakan," jelasnya dalam salah satu Seminar *Tax Amnesty 'Jembatan Penyelesaian Masa Lalu dan Gerbang Tax Reform'* di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu, per 21 Februari 2017, tercatat jumlah realisasi amnesti pajak mencapai Rp11,7 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran uang tebusan amnesti pajak sebesar Rp104,3 triliun, pembayaran penghentian pemeriksaan bukti permulaan sebesar Rp782 miliar, dan pembayaran atas tunggakan pajak sebesar Rp6,6 triliun. Dari pembayaran tebusan tersebut, yang berasal dari Orang Pribadi Non Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp85,9 triliun, Orang Pribadi UMKM sebesar Rp5,3 triliun, Badan Non UMKM sebesar Rp12,5 triliun, dan Badan UMKM sebesar Rp372 miliar. Di sisi lain, komposisi harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang telah dilaporkan pada periode yang sama tercatat sebesar Rp4.388 triliun. Nilai itu berasal dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.232 triliun,

deklarasi luar negeri sebesar Rp1.016 triliun, serta dari hasil repatriasi sebesar Rp141 triliun.

Mengejar akhir periode ketiga

Periode ketiga merupakan kesempatan terakhir bagi WP untuk memanfaatkan program amnesti pajak. Untuk itu, pemerintah bergerak lebih gencar dalam melakukan sosialisasi kepada WP utamanya bagi yang belum berpartisipasi dalam periode sebelumnya. Kesempatan ini seharusnya menjadi kesempatan emas bagi para WP sebelum diberlakukannya keterbukaan informasi keuangan secara global untuk tujuan perpajakan. Sebab, saat kebijakan tersebut telah diimplementasikan, WP tidak akan punya kesempatan lagi untuk menyembunyikan asetnya dari otoritas pajak.

Menjelaskan lebih rinci, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP, Yon Arsal, mengungkapkan fokus strategi pada periode ketiga ini akan lebih diarahkan kepada WP UMKM dan WP non-prominen. Salah satu strateginya adalah dengan lebih mempermudah dan menyederhanakan prosedur dan urusan administrasi penyampaian SPH. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Bagi Wajib Pajak Tertentu, serta Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan dan Penerbitan Surat Keterangan Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu. Selain itu, strategi lain yang akan dilakukan adalah dengan mengirimkan himbauan massal

melalui surat elektronik kepada para WP berdasarkan basis data kepemilikan harta secara lebih komprehensif.

Lebih lanjut, ia juga menerangkan sampai saat ini sektor UMKM baru menyumbang uang tebusan sebesar Rp5,7 triliun atau 5,48 persen dari total penerimaan uang tebusan amnesti pajak. Peran UMKM tersebut diharapkan dapat lebih meningkat pada periode ketiga. Karena, menurutnya, sektor UMKM memperoleh tarif tebusan yang khusus. Mereka tidak diberlakukan pembedaan tarif selama tiga periode berturut-turut. Ia memperkirakan sektor ini akan lebih banyak berpartisipasi pada akhir periode ketiga.

Pasca amnesti pajak

Amnesti pajak diharapkan dapat menjadi gerbang untuk memulai reformasi perpajakan secara menyeluruh yang mencakup kebijakan dan administrasi perpajakan. Selain itu, untuk mendukung reformasi, Kementerian Keuangan juga harus mempersiapkan program keterbukaan informasi keuangan secara global untuk tujuan perpajakan. Yon Arsal juga menjelaskan beberapa strategi yang akan dilakukan pasca amnesti pajak. Menurutnya, perluasan basis data yang diperoleh dari program amnesti pajak perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menggali potensi pajak.

Hal itu dapat dilakukan melalui, pertama, mengelompokkan harta yang telah dilaporkan berdasarkan klasifikasinya, kemudian melakukan analisis

jenis penghasilan dan potensi pajaknya berdasarkan jenis harta tersebut. Yang kedua adalah melakukan pengawasan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya melalui dua aspek, yaitu aspek kepatuhan formal yang dilakukan dengan cara pengawasan terhadap pelaporan pajak dan pelaporan harta tambahannya dari SPH ke dalam SPT. Kemudian, dari aspek kepatuhan material dengan memanfaatkan data amnesti pajak untuk menguji kepatuhan pajaknya.

Sementara itu, reformasi di bidang kebijakan dan administrasi perpajakan salah satunya dilakukan dengan melakukan revisi peraturan di bidang perpajakan. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Arif Yanuar, menjelaskan bahwa data dan informasi baru mengenai kekayaan WP, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, perlu ditindak lanjuti dengan membuat aturan yang lebih komprehensif dan harmonis. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan dari sektor orang pribadi, dan mencegah penghindaran pajak melalui transaksi *cross-border* atau pihak yang terafiliasi di luar negeri.

“Adapun tantangan saat ini adalah terkait persiapan perubahan Undang-Undang Perpajakan, yaitu Undang-Undang KUP, PPh, PPN, dan Bea Materai perlu diselaraskan atau diharmonisasikan dengan tujuan penyusunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak. Yaitu menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan yang diharapkan diikuti dengan peningkatan *tax ratio* dan penerimaan pajak,” jelas Arif.

Sementara itu, pengamat perpajakan dari *Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA)*, Yustinus Prastowo, berpendapat bahwa Undang-Undang Perpajakan sebaiknya dapat dibahas dalam satu paket Undang-Undang Perpajakan. Hal ini, menurutnya, selain karena efisiensi juga karena pasca amnesti pajak, masyarakat mempunyai harapan yang besar untuk melihat perubahan dari adanya reformasi perpajakan. Misalnya, revisi Undang-Undang Penghasilan yang diusulkan tahun depan masih terlalu lama untuk memberikan manfaat bagi WP saat ini, khususnya bagi yang mengikuti amnesti pajak. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan strategi lainnya (*second base option*) untuk mendukung hal tersebut. Sebagai contoh, pemerintah dapat melakukan perbaikan di level praktis melalui digitalisasi layanan untuk memberikan kemudahan WP dalam mengurus perpajakannya.

Menuju keterbukaan informasi keuangan dunia

Adanya transparansi informasi keuangan secara global untuk tujuan perpajakan melalui *Automatic Exchange of Information (AEOI)* juga menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipersiapkan pasca berakhirnya amnesti pajak. Direktur Perpajakan Internasional DJP, John Hutagaol, menerangkan bahwa pada tahap pertama AEOI sudah terdapat 101 negara yang berkomitmen untuk ikut serta dalam program tersebut. Menurutnya, setiap negara yang sudah berkomitmen dalam AEOI harus segera menyiapkan perangkat hukum, serta perangkat tata kelola dan infrastruktur informasi teknologi yang mendukungnya.

Untuk itu, lanjutnya, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam mempersiapkan AEOI di Indonesia. Pertama, kerangka hukum yang terdiri dari dua aspek, yaitu kerangka hukum/perjanjian internasional (*international legal framework*) dan kerangka hukum/perjanjian domestik (*domestic legal framework*). Terkait kerangka hukum/perjanjian internasional, ia menjelaskan sampai saat ini pemerintah telah melakukan setidaknya empat macam perjanjian dalam rangka meratifikasi perjanjian internasional AEOI, yakni penandatanganan *Convention on Mutual Assistance in Tax Administration Matters* pada tahun 2011 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2014, penandatanganan *Multilateral Competent Authority Agreement* pada tahun 2015, pembuatan *tax treaty*, dan membuat *Tax Information Exchange Agreements (TIEA)*.

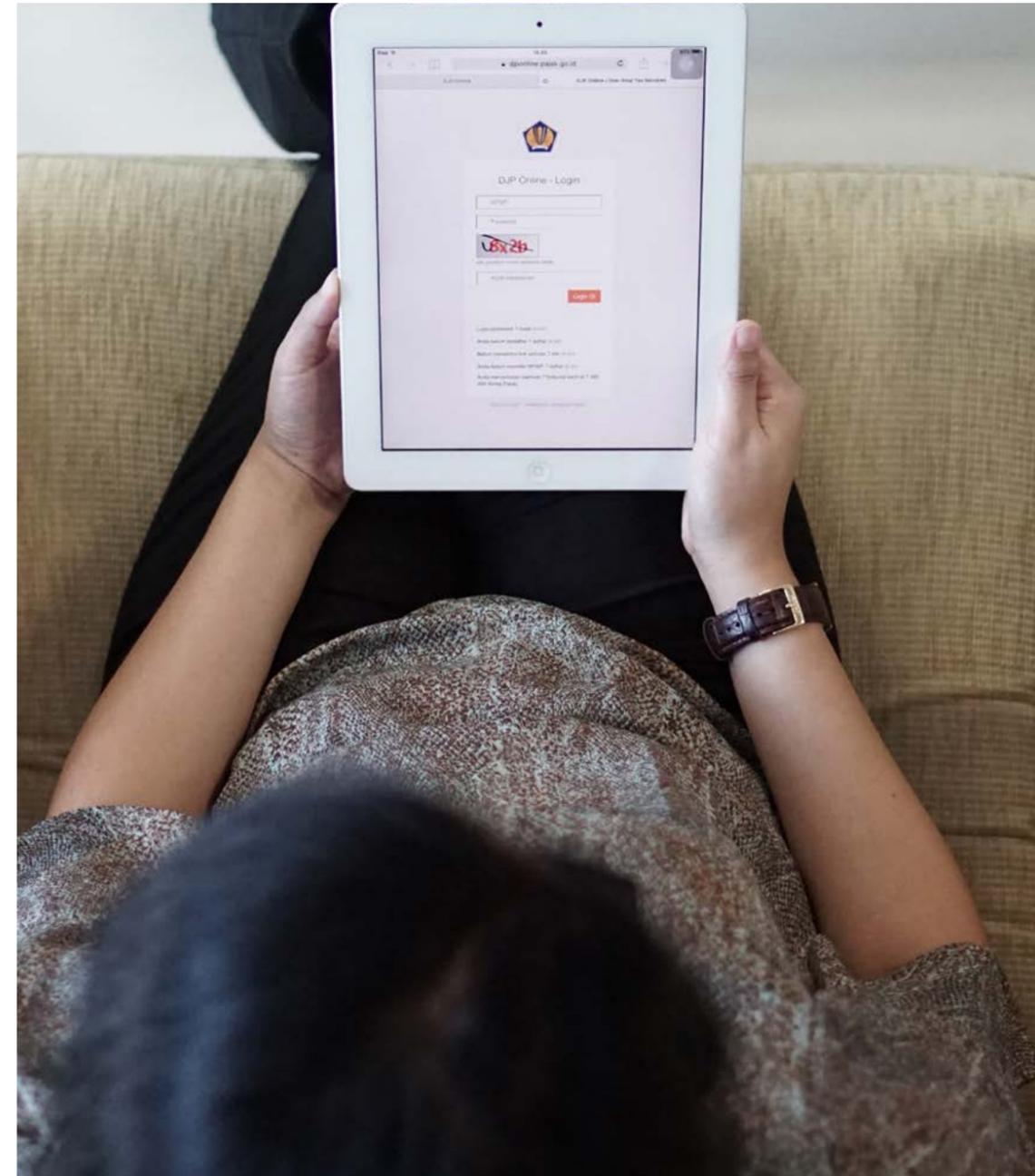
Sementara itu, persiapan kerangka hukum domestiknya mencakup penyiapan Undang-Undang sebagai *primary legislation*-nya, beserta peraturan pelaksanaannya sebagai *secondary legislation*.

Yang kedua, menurut John, adalah masalah tata kelola dan infrastruktur teknologi informasi. Hal tersebut tentunya akan memberikan pengaruh secara fundamental terkait cara DJP dalam bekerja mengadministrasikan penerimaan negara. “Diperlukan teknologi yang mumpuni untuk menjaga *confidentiality* dan *safeguard* dari data itu. Kerahasiaan dan keamanan data itu harus terjaga. Termasuk SDM-nya harus mampu. Bukan hanya mampu punya *skill expertise*, tapi dia juga punya integritas,” jelasnya.

Menambahkan hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menilai pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan pertukaran otomatis informasi keuangan untuk tujuan perpajakan atau AEOI pada September 2018. Menurutnya, poin penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa informasi kerahasiaan bank (*bank secrecy*) tersebut hanya diperuntukkan untuk tujuan perpajakan. Lebih lanjut, Andreas menambahkan bahwa penyesuaian hak akses informasi terhadap data perbankan tersebut masuk dalam ranah *primary legislation*, yang mencakup Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Pasar Modal. Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap ketiga Undang-Undang tersebut sebelum AEOI dimulai.

Teks Abdul Aziz

Modernisasi Teknologi Informasi Untuk Pajak



Lapor pajak lebih mobile.

Foto Aditya Arifiyanto

Modernisasi perpajakan salah satunya ditandai dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) yang handal dan terkini. Kapasitas TI pajak dipercaya menjadi faktor krusial untuk meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Iwan Djuaniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, penerimaan pajak berbicara mengenai tiga fungsi yakni pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Kombinasi ketiga hal tersebut akan menghasilkan *compliance* yang berujung pada naiknya penerimaan pajak. Pemanfaatan TI dalam ketiga fungsi tersebut sudah menjadi keharusan agar sistem perpajakan bisa mengikuti perkembangan zaman. "Ibaratnya, kalau Wajib Pajak (WP) jalan pakai Ferrari, terus kita pakai bemo *kan* tidak akan terkejar," ujar Iwan.

Dijelaskan Iwan lebih lanjut, ada empat pilar strategi TI perpajakan saat ini. Pertama, mobilitas agar WP bisa dilayani secara *online* kapan saja dari mana saja. Dengan begitu, WP akan lebih gampang untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Pilar kedua adalah *big data* atau pengolahan banyak data dalam beragam format. Dengan sistem pajak *self assessment*, DJP dapat lebih cepat mencocokkan laporan pajak dari WP dengan data yang sudah dianalisa.

Pilar ketiga adalah penggunaan komputasi awan untuk meningkatkan kapasitas pusat data perpajakan. Penyimpanan data bisa dilakukan lebih cepat dengan biaya rendah. Selain itu, Ditjen Pajak tidak perlu memikirkan infrastruktur karena komputasi awan cukup disewa dari penyedia jasa.

Pilar terakhir adalah *social business* agar TI pajak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan bisnis dan sosial WP. "Selain memudahkan WP, pilar ini juga membantu petugas pajak dalam melakukan analisis hubungan satu bisnis dengan bisnis lainnya, ujar Iwan.

Sejauh ini, Ditjen Pajak telah menyediakan empat layanan *online*. Layanan yang paling dikenal masyarakat adalah *e-filing*, sarana untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Tahun lalu DJP sudah

menerima tujuh juta SPT melalui *e-filing*.

Diceritakan Iwan, untuk tahun ini, *e-filing* akan menyediakan pilihan *e-form* untuk SPT 1770 dan 1770S. "Nantinya WP bisa mengunduh formulir dan mengisinya secara *offline* untuk kemudian kemudian diunggah kembali ke situs DJP. Target kami tahun ini 45 persen WP sudah menggunakan *e-filing*," kata Iwan. Selain itu masih ada lagi *e-registration* bagi masyarakat yang ingin membuat NPWP serta *e-tax invoice* dan *e-billing*.

Iwan mengakui, DJP masih perlu terus melakukan sosialisasi agar jumlah WP yang memanfaatkan layanan *online* meningkat. Namun dirinya tidak kesulitan mengubah kebiasaan masyarakat, mengingat kebanyakan generasi masa kini senang memanfaatkan teknologi yang bersifat *mobile*. "Orang sudah malas lapor SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Maunya dari rumah atau kantor sembari kerja. Banyak juga yang melapor di akhir waktu. Akibatnya terlalu banyak yang mengakses DJP *online*. Sebab itu, kami siasati dengan *offline e-form* agar sistem kita tidak terlalu berat," tutur Iwan.

Ditanya mengenai dampak yang dirasakan dari pengembangan TI pajak beberapa tahun terakhir, Iwan mengatakan setiap tahun Ditjen Pajak melakukan survei kepuasan bisnis proses dan layanan yang hasilnya cukup menggembirakan. Bahkan, dalam studi *Paying Taxes*

yang dilakukan Bank Dunia dan PricewaterhouseCooper (PwC), Indonesia naik 44 peringkat menuju posisi 104 di antara 190 negara di tahun 2016. Tahun sebelumnya Indonesia berada di peringkat 148 dari 189 negara. Perbaikan peringkat tersebut dengan sendirinya mencerminkan upaya reformasi perpajakan yang positif.

Sebelumnya, Ay Tjhing Phan, *Tax and Legal Service Leader* PwC Indonesia berkomentar, kenaikan peringkat ini terjadi berkat digitalisasi sistem perpajakan dan elektronifikasi sistem jaminan sosial. Phan menilai, sistem yang efisien khususnya terkait restitusi dan pemeriksaan, membuat pemungutan pajak semakin mudah. "Hal ini juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi, sembari memperluas basis perpajakan Indonesia," katanya.

Andri Rahman, *Chief Financial Officer* sebuah perusahaan *digital agency* yang tercatat sebagai WP patuh di Jakarta mengatakan, saat ini perusahaan mereka memang belum menggunakan *e-Filing* sebagai sarana pelaporan pajaknya. Namun, jika melihat dari berbagai fitur yang ditawarkan, Andri meyakini penggunaan *e-filing* akan mengefisienkan waktu serta biaya. "Kami berencana untuk mulai memanfaatkan *e-filing* tahun ini. Kelihatannya akan lebih praktis mengingat tidak memerlukan *hard copy* dan pelaporan langsung ke kantor pajak," ungkap Andri.

Teks Irma Kesuma

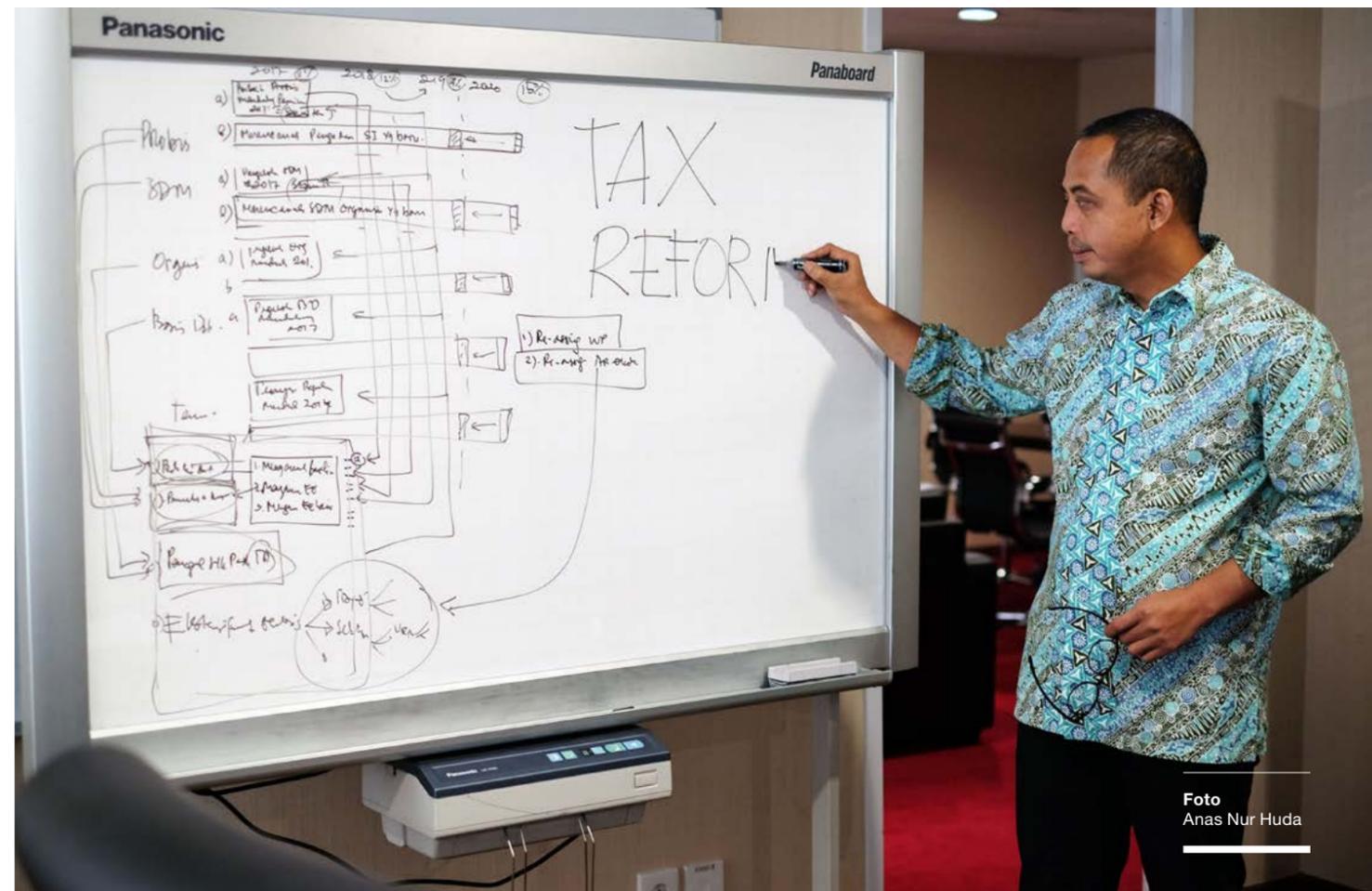


Foto Anas Nur Huda

Reformasi adalah Keharusan

Saat impian semakin tinggi, kinerja pun diupayakan semakin maksimal. Begitulah gambaran terhadap Tim Reformasi Perpajakan, dibentuk untuk meningkatkan penerimaan.

Setelah program Amnesti Pajak mendapat banyak apresiasi positif dari masyarakat dan dunia internasional, Kementerian Keuangan kembali mencari terobosan untuk meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan telah mengesahkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan. Kinerja tim ini tidak hanya dibebankan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun menggaet berbagai kalangan di luar Kementerian Keuangan. Ditemui di Kantor Pusat DJP pertengahan Februari lalu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana, Suryo Utomo, menjelaskan lebih rinci mengenai reformasi pajak ini.

Akhir tahun 2016, Kementerian Keuangan meluncurkan Tim Reformasi Perpajakan. Apa latar belakang Pemerintah membentuk tim tersebut?

Reformasi ini berangkat dari *tax ratio* yang cenderung menurun dari tahun ke tahun sedangkan tuntutan dari pembangunan bertambah. Prinsipnya, kita harus melakukan pembenahan dalam organisasi, baik dari segi tata kerja, regulasi, struktur, atau sumber dayanya. Kaitannya dengan penerimaan pajak, tentu saja membutuhkan *effort* yang luar biasa. Tim reformasi ini dibentuk untuk mendesain peta permasalahan kemudian memformulasikan dari sisi yang mampu disentuh dan ditangani.

Perbaikan organisasi ini untuk meningkatkan penerimaan dalam jangka panjang. Penerimaan pajak pun tidak serta merta diupayakan sendiri, perlu kepatuhan dan kepercayaan Wajib Pajak (WP) terhadap institusi perpajakan. Diharapkan, selain perbaikan organisasi juga diikuti dengan perubahan perilaku WP ke arah yang lebih baik. Reformasi ini tidak hanya menyentuh organisasi, tapi juga menaikkan kepercayaan publik. Reformasi adalah keharusan.

Anggota Tim Reformasi Perpajakan ini terdiri dari berbagai kalangan, seperti pengusaha, pengamat, hingga wartawan. Apa tujuan utama keterlibatan berbagai kalangan tersebut?

Menteri Keuangan memandang pajak sebagai pondasi negara karena hampir 70 persen lebih sumber pembiayaan itu bersumber dari pajak. Mau tidak mau ya kita harus memperkuat pajak di dimensi yang lain. Mengapa melibatkan

berbagai kalangan? Karena pajak itu multidimensional, pajak itu tidak bisa berjalan sendiri. Terlebih, pajak itu membutuhkan *counterpart* (pasangan). Siapa mereka? Tentu saja pelaku atau WP.

DJP memiliki ribuan proses bisnis yang harus dijaga secara akuntabel. Maka, kita bicara sistem perpajakan. Misalnya dalam hal pelayanan. Berdasarkan riset, salah satu faktor yang meningkatkan kepatuhan WP adalah adanya kemudahan penyelesaian kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kita meminta pandangan dari beberapa pihak. Misalnya wartawan, kita ingin tahu pandangan publik terhadap institusi perpajakan seperti apa. Nah dengan pandangan seperti itu kita bisa merefleksikan diri. Terlebih, kita ingin mengikis citra buruk DJP di mata publik.

Reformasi dalam bidang pajak bukan pertama kali dilakukan. Apa yang berbeda dari Tim Reformasi Perpajakan ini dengan reformasi sebelumnya?

Reformasi itu sebenarnya sudah dilakukan secara berkelanjutan. Reformasi pernah dilakukan di tahun 1984, yaitu pembentukan regulasi perpajakan yang terintegrasi dan mengubah sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Tahun 2002 juga pernah dilakukan reformasi yang lebih dititikberatkan pada peningkatan pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Sedangkan reformasi saat ini lebih diarahkan pada pembenahan fundamental sistem administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan ini meliputi organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data, proses bisnis,

dan regulasi peraturan perpajakan untuk membentuk institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU mengenai perpajakan lainnya telah menjadi bagian dari reformasi perpajakan. Bagaimana perkembangannya saat ini?

Saat ini UU KUP sudah masuk dalam proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses bisnis kelembagaan institusi perpajakan juga masuk dalam rancangan perubahan UU KUP. Saat ini kita sedang mempersiapkan kapasitas institusi administrasi perpajakan yang optimal sebelum penerapan kelembagaan institusi perpajakan berdasarkan perubahan UU KUP. Sedangkan UU mengenai perpajakan lainnya sedang dalam proses pembahasan internal pemerintah. Di samping itu, aspek-aspek reformasi perpajakan yang sedang dilakukan akan diakomodasi dalam rancangan perubahan UU perpajakan.

Apa harapan Anda terhadap kinerja Tim Reformasi Perpajakan, terutama setelah program amnesti pajak berakhir pada akhir Maret 2017?

Semoga ekspektasi tim ini bisa terealisasikan. Saya juga berharap DJP bisa lebih kredibel, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pondasi negara. Dengan adanya momentum keterbukaan informasi melalui amnesti pajak, saya berharap WP bisa membayar pajak sesuai dengan kewajiban. Momentum ini merupakan babak baru penegakan hukum yang lebih berkeadilan.

Teks Pradany Hayyu

Menkeu Hadiri Peluncuran fasilitas KITE untuk IKM



Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri peluncuran fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Acara ini dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi pada Senin (30/01) di Dusun Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan persaingan antarpengusaha dan antarnegara semakin berat. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya perekonomian dunia. Presiden juga berharap pemerintah dapat mendukung semua industri kecil maupun menengah. Diterangkan juga bahwa dengan adanya KITE IKM, (biaya) akan lebih efisien, kurang lebih sekitar 25 persen. "Pertama, harga bahan baku bisa dibeli langsung. Kedua, biaya pajak impor dihilangkan. Ketiga, bea masuk juga dihilangkan. Kalau bisa dimanfaatkan oleh UKM kita, daya saing kita jadi lebih baik", imbuhnya.

Menkeu menyampaikan bahwa KITE merupakan produk dari paket kebijakan ekonomi jilid I, untuk mendukung kebijakan-kebijakan bidang industri yang masih bersifat umum, dan belum memihak IKM. Dengan adanya program KITE IKM ini, akan ada kemudahan terhadap komoditas impor yang dibutuhkan IKM sebagai bahan baku pembuatan produk-produk berorientasi ekspor. Lebih lanjut Menkeu menjelaskan bahwa fasilitas ini menasar industri kecil dan menengah yang berdiri secara mandiri ataupun yang membentuk konsorsium berupa badan usaha, IKM koordinator, atau koperasi. Menurutnya,

Pemerintah perlu mendorong usaha IKM agar mempunyai daya saing yang lebih kuat di pasar global. "Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan yang bersifat khusus atau spesifik yang didalamnya memberikan kemudahan mengimpor bahan baku, dan barang modal tanpa membayar bea masuk dan pajak impor, persyaratan perizinan yang mudah dan tidak diwajibkannya laporan surveyor pada saat impor," jelas Menkeu.

Acara ini juga dihadiri antara lain oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliawan Hadad, dan perwakilan dari Komisi VI DPR RI. Desa Tumang sendiri dipilih sebagai lokasi sosialisasi fasilitas KITE IKM karena daerah ini merupakan salah satu sentra industri logam di Indonesia dan cukup banyak menyerap tenaga kerja. Di sana banyak perajin tembaga yang produksinya diekspor sampai ke Eropa.

Teks Dewi Rusmayanti



Menkeu Tinjau Pembangunan Tol Semarang-Solo

Foto
Langgeng Wahyu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau proses pembangunan jalan tol Semarang-Solo khususnya di Seksi III Bawen-Salatiga yang direncanakan dibangun sepanjang 17,60 km. Jalan Tol Semarang-Solo memiliki total panjang 72,64 km yang terbagi menjadi lima seksi. Seksi I yaitu Semarang-Ungaran (10,85 km) telah beroperasi sejak 11 November 2011 dan seksi II Ungaran-Bawen (11,99 km) telah dioperasikan pada 4 April 2014. Sedangkan seksi III progres pembangunannya telah mencapai 90,48 persen dan direncanakan selesai pada Maret 2017. Selanjutnya untuk Seksi IV Salatiga-Boyolali (24,5 km) sedang dalam proses konstruksi dan pembebasan lahan. Begitu juga untuk seksi V Boyolali-Kartasura (7,74 km) sudah dilakukan konstruksi dan proses pembebasan lahan.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan bahwa jalan raya merupakan salah satu urat nadi terutama di daerah, dimana aktivitas masyarakat, ekonomi, serta mobilitas masyarakat antar kota sudah semakin tinggi dan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Sehingga perlu penyesuaian antara pembiayaan dengan kebutuhan untuk penyelesaian pembangunan secara cepat.

“Kita meminta kepada Menteri PUPR dan BPJT untuk

memikirkan, nanti kita bersama-sama dengan Kementerian Keuangan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk bisa mampu membiayai secara baik dan merangkum resiko dengan baik juga, sehingga kemajuan fisiknya tidak terhalang dengan kendala pembiayaan. Kita tentu juga berharap bahwa dengan skema pembiayaan baik melalui subsidi, penjaminan maupun berbagai fasilitas yang dimiliki oleh BUMN dibawah Kementerian Keuangan dan juga dari penjaminan maupun dari *project development fund* bisa digunakan oleh berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur,” jelas Menkeu.

Menkeu juga mengatakan bahwa kunjungan ini penting agar dapat memahami dan melihat peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara nyata sebagai pendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Teks Dewi Rusmayanti



Risma menggunakan jas hujan dan sepatu boots saat terjun langsung untuk memantau kondisi kota Surabaya yang dilanda angin kencang dan hujan.

Foto
Agus Tri Hananto

Cara Risma Memimpin Surabaya

Wawancara Media Keuangan dengan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, beberapa waktu lalu mendadak berhenti. “Sebentar ya, saya harus cek,” kata perempuan yang akrab disapa Risma itu. Dia kemudian meminta jendela ruangan balaikota dibuka. Rupanya angin bertiup kencang dan hujan mulai turun. Dengan sigap, Risma memberikan instruksi kepada jajarannya melalui *handy talky*. Tak berapa lama kemudian, dia sudah memakai sepatu boots dan jas hujan, siap terjun ke

lapangan.

Sebagai pemimpin, Risma tak hanya bagus dalam membuat konsep pembangunan di atas kertas. Dia memantau langsung ke lapangan dan secara rutin mengajak warga berbincang-bincang. Di bawah kepemimpinannya, Surabaya—kota terbesar kedua di Indonesia—mengalami kemajuan, tanpa meninggalkan sisi humanisme. Berikut petikan wawancara Media Keuangan dengan walikota yang telah meraih begitu banyak penghargaan nasional dan internasional tersebut.

Salah satu kebijakan Anda yang fenomenal adalah menutup kawasan lokalisasi Dolly. Bagaimana Anda melakukannya?

Niat kami adalah mentransformasi para pekerja seks komersial di sana, dari bekerja di sektor informal ke sektor formal. Persiapan program transformasi itu sebenarnya yang memakan waktu lama, bukan saat menutupnya. Kami melatih warga di sana selama dua tahun dan terus mematangkan konsep pekerjaan yang pas bagi mereka. Ternyata kemudian lahir ide-ide luar biasa dari warga yang mungkin selama ini tidak bisa mereka kembangkan karena berbagai keterbatasan.

Kami terus mendampingi warga. Sekarang ini, ada warga yang dulunya tukang parkir di kawasan Dolly menjadi pengusaha kaos dengan jumlah karyawan sebanyak 45 orang. Contoh lain, ada warga di lokalisasi yang kini menjadi pengusaha batik. Bahkan dahulu tidak ada produk yang namanya batik Surabaya. Sekarang warga bisa menjual batik Surabaya yang mereka buat sendiri dengan penghasilan di atas sepuluh juta.

Ruang terbuka hijau (RTH) di Surabaya bertambah secara signifikan. Bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Surabaya?

Masyarakat Surabaya sekarang lebih terbuka, wise, dan ramah. Mereka tidak gampang marah karena ada tempat untuk relaksasi. Kalau ingin rekreasi saat sedang tidak punya uang, mereka bisa ke taman saja. Pindah dari satu taman ke taman yang lain dengan tema yang berbeda-beda.

Hal seperti itu sudah bisa menjadi hiburan baik bagi anak-anak maupun orang tua yang bingung mau liburan ke mana. Biaya hidup warga Surabaya

jadi lebih rendah, sehingga *human development index* kami naik. Dulu peringkat kami di bawah Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Peringkat Surabaya pada 2016 tertinggi di pulau Jawa.

Bagaimana cara Anda melibatkan masyarakat Surabaya dalam pembangunan kota?

Saya tidak mau mengeksploitasi kota ini sehingga yang kuat *lah* yang akan menang. Oleh karena itu, saya mencoba mengajak warga untuk bangkit bersama. Dengan demikian, bukan hanya golongan tertentu saja yang menang.

Kami membuat fasilitas yang mengakomodir kepentingan bersama. Contohnya, *pedestrian* bukan tempat untuk makan. Maka, saya harus menyiapkan sentra pedagang kaki lima untuk berjualan. Kalau kami sudah siapkan tempat, maka pedagang juga harus menurut dan tidak berjualan menepati jalan. Semua harus dikondisikan dengan baik agar kota ini terasa nyaman. *Alhamdulillah* mereka mengerti.

Memang kadang saya keras dalam upaya mengubah perilaku masyarakat. Contohnya, setiap hari Dinas Perhubungan turun ke lapangan dan mengajak kepolisian memutari Surabaya. Kalau ada masyarakat yang melanggar parkir akan ditilang di tempat. Kemudian kalau tidak bisa ya digemboskan ban kendaraannya.

Surabaya menjadi kota utama penyokong pertumbuhan di Jawa Timur, sehingga bisa melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Apa resepnya?

Terus terang, sejak awal menjadi walikota, saya tidak mau berpikir tentang pertumbuhan ekonomi. Saya hanya

berpikir jangan sampai pertumbuhan ekonomi naik dengan pesat, tetapi yang menikmati hanya golongan atas saja. Sementara masyarakat bawah tidak berkembang.

Namun, ketika kami kemudian mempunyai program 'Pahlawan Ekonomi', ternyata pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah naik. Sekarang saya harus mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan program tadi, saya bisa membawa masyarakat bawah, yang tadinya dari kelompok miskin naik ke atas, masuk ke dalam perputaran ekonomi. Itulah mengapa kemudian saya percaya terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang perlu saya lakukan adalah bagaimana menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi dari level bawah sampai ke atas bisa terus seimbang.

Angka pengeluaran konsumsi dalam lima tahun di Surabaya naik 80 kali lipat, artinya pengeluaran masyarakat naik 80 kali lipat. Kalau dibandingkan dengan peningkatan di Jakarta mungkin hanya 10 atau 15 kali. Padahal di Surabaya, biaya sekolah dan kesehatan gratis. Tarif air PDAM selama lima tahun juga tidak pernah naik. Ada belanja pemerintah kota yang saya tekan pengeluarannya, tetapi konsumsi masyarakat tetap naik. Jadi pertumbuhan ekonomi itu harus merata. Bukan masyarakat kelas atas saja yang naik. Itu yang saya lakukan di Surabaya.

Anda juga membuat kampung-kampung tematik, seperti Kampung Lontong dan Kampung Batik. Apa tujuannya?

Ekonomi dari dalam rumah itu bisa sangat bermanfaat. Rumah juga bisa menjadi tempat usaha. Mengapa? Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup rumah tangga. Mengapa kampung tematik? Supaya kegiatan ekonominya



Tri Rismaharini.

Foto Agus Tri Hananto

memang berawal dari rumah. Di samping itu, kami membuat kampung tematik juga dengan alasan mudah *treatment*-nya. Contohnya, saya harus paksakan gas itu masuk di Kampung Kue atau Kampung Lontong. Karena dengan gas, biaya operasionalnya bisa lebih murah.

Seperti apa rencana Anda terhadap pengembangan pariwisata, termasuk seni dan budaya?

Kami berusaha untuk melengkapi sektor jasanya terlebih dahulu, itu intinya. Kami kaget ketika Surabaya mendapatkan penghargaan nomor dua di bidang pariwisata. Sekarang hotel-hotel di Surabaya setiap akhir pekan selalu penuh. Kami hidupkan lagi seni budaya, misalnya dengan membina seniman Tari Reog. Mungkin saat ini pertunjukan reog lebih banyak di Surabaya daripada di Ponorogo daerah asalnya. Ada anggota masyarakat bilang, "Bu saya orang asli Ponorogo, saya mau mengembangkan reog". Masa saya bilang tidak boleh. Saya bilang, "Oke, jalan saja. Surabaya ini rumah bersama".

Apa saja belanja Pemkot yang dikurangi?

Sejak saya jadi Walikota, tidak ada anggaran untuk membuat acara di hotel. Kalau mau rapat ya kami adakan di ruangan milik Pemkot. Ruang rapatnya yang saya perbaiki.

Kemudian penggunaan kertas juga saya tekan. Kami menggunakan sarana elektronik.

Sekarang semua pejabat saya berikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan uang kinerja, sehingga belanja seragam untuk golongan eselon III dan II dihapus. Kami juga mencoba melakukan penyederhanaan organisasi. Beberapa organisasi saya hapus dan lebur. Tahun lalu, belanja pegawai kami 28 persen dari APBD, sekarang sekitar 26 persen.

Bagaimana rencana pembangunan Surabaya ke depan?

Tidak mungkin kami terus membangun jalan. Mau kami buat berapa lantai jalannya? Yang bisa kami lakukan adalah bagaimana membuat keberadaan angkutan massal dan pribadi di Surabaya minimal bisa 50:50. Kalau terlalu banyak angkutan pribadi, kota akan macet dan tidak efisien. Pengembangan angkutan massal harus mulai dikerjakan supaya masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Namun, memaksa masyarakat untuk menggunakan angkutan umum itu kan tidak mudah. Jangan sampai pergeserean ini kemudian membuat akses ekonomi terganggu. Selain itu, angkutan massal harus nyaman sehingga masyarakat mau berpindah haluan. Angkutan umum juga harus aman. Jika tidak, bagaimana mungkin orang percaya untuk naik angkutan umum.

Kemudian yang terakhir adalah tarif angkutan umum harus murah. Pemkot harus berpikir dengan seimbang dengan mempertimbangkan sektor mana yang bisa memberikan pendapatan dan sektor mana yang harus diberikan subsidi. Itu sebabnya mengapa kami berikan subsidi untuk angkutan umum.

Teks Dwinanda Ardhi



Torehan Prestasi dari Ujung Timur Jawa

KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi

Belajarlah dari kegagalan dan teruslah melangkah. Itulah ungkapan yang dijadikan motivasi oleh KPPC Banyuwangi hingga mampu meraih prestasi.

Kepala Kantor KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi, Benyamin Lilipaly

Foto Resha Aditya P.

Banyuwangi kini telah menjadi primadona. Berkat pertumbuhan di bidang pariwisata, nama Banyuwangi tidak hanya harum di Indonesia, namun juga di dunia. Sebagai pusat destinasi pariwisata, kota yang dijuluki *Sunrise of Java* ini menyuguhkan segala keelokan yang mampu menarik minat wisatawan. Sebut saja wisata kawah Gunung Ijen, wisata Pantai Plengkung yang menjadi tujuan utama peselancar dunia, hingga festival budaya bertaraf internasional.

Selaras dengan pertumbuhan kota, jajaran bea dan cukai Banyuwangi pun semakin meningkatkan kinerja. Semangat kerja keras Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Banyuwangi mendapat apresiasi yang membanggakan. Pada tahun 2016, KPPBC Banyuwangi berhasil meraih predikat Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik dalam Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPC) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Evaluasi demi perbaikan

Benyamin Lilipaly, Kepala KPPBC Banyuwangi mengungkapkan, pertama

yang harus dilakukan dalam persiapan Penilaian KPPC adalah menyatukan visi bersama seluruh pegawai. Setelah visi ditentukan, maka misi bisa dijalankan. Hal yang tak kalah penting, Benyamin juga mengevaluasi kegagalan di tahun sebelumnya, apa saja yang kurang harus diperbaiki. “Teman-teman memiliki motivasi tinggi untuk ikut Penilaian KPPC ini. Akhirnya, kami menampung ide-ide yang ada untuk tahun 2016,” jelasnya. Langkah nyata berikutnya yaitu pembenahan arsip. “Arsip itu arwah dari kantor. Kantor mana yang tidak memiliki arsip. Bila arsipnya bagus dan teratur, maka akan ketahuan sejarah kantor tersebut. Apa saja pelayanan yang pernah



Seorang Pegawai sedang memeriksa arsip Kantor KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi

Foto Anas Nur Huda

dilakukan, pengawasan apa saja yang sudah dikerjakan,” lanjutnya.

Berikutnya, Benyamin beserta jajaran berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan. Untuk menuju pelayanan prima, KPPBC berusaha membenahi perlengkapan yang ada. Perbaikan dan pembaruan komputer juga dilakukan karena sebagian besar pekerjaan kini telah menggunakan aplikasi dalam jaringan internet. Kemudian, pelayanan *front office* juga lebih ditingkatkan karena *front office* merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan *stakeholders*.

Layanan unggulan

Setiap kantor pasti memiliki layanan unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. KPPBC Banyuwangi menyadari, tidak semua *stakeholders* terdiri dari pengusaha yang memiliki akses internet untuk mengirimkan surat elektronik. Di Banyuwangi, masih banyak pengusaha kecil yang berada jauh dari pusat kota dan tidak bisa mengoperasikan komputer. Maka, KPPC Banyuwangi melakukan penjemputan CK-4 (data pemberitahuan barang kena cukai yang telah selesai dibuat).

Layanan penjemputan ini memiliki hal positif. Selain bisa melakukan pengawasan langsung, petugas bea dan cukai juga bisa melakukan sosialisasi di

area publik, seperti pasar, bersama Kepala Kecamatan setempat. Tema sosialisasi biasanya mengenai rokok ilegal. Layanan ini terbukti efektif. Bagaikan pepatah, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Dalam satu kegiatan penjemputan CK-4, maka berbagai aktivitas lainnya bisa terlaksana, yaitu pelayanan prima, pengawasan serta penyuluhan. Dari segi biaya, terobosan ini juga sangat efisien. Biasanya, kegiatan pengawasan dan pelayanan dilakukan terpisah.

Beberapa tahun sebelumnya, KPPBC Banyuwangi masih minim melakukan sosialisasi. Sebagian masyarakat belum memahami arti pabea dan cukai. Kini, sosialisasi semakin sering digalakkan hingga tingkat kecamatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Terkadang masyarakat tidak menyadari telah melakukan pelanggaran karena memang tidak memahami peraturannya. Ketidaktahuan masyarakat ini yang harus diberantas dengan berbagai sosialisasi yang efektif. Peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi menjadi tantangan tersendiri bagi kantor yang berlokasi di kompleks Pelabuhan Ketapang ini.

Di samping itu, KPPBC Banyuwangi juga rutin melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan dengan kalangan kampus dan sekolah menengah atas, seperti Universitas Airlangga dan beberapa sekolah menengah atas di Banyuwangi. Politeknik Universitas

Surabaya juga pernah melakukan studi banding demi memahami lebih jauh mengenai fungsi kepabea dan cukai. Untuk lebih mengefektifkan informasi mengenai bea dan cukai kepada masyarakat, KPPBC Banyuwangi juga melakukan *radio talk*.

Untuk lebih mendekatkan dengan para *stakeholders*, KPPBC memiliki cara tersendiri. Setiap bulan KPPC Banyuwangi mengadakan layaknya *stakeholders gathering* yang berisi sosialisasi mengenai peraturan kepabea atau cukai. Dalam suasana santai tersebut, petugas bea dan cukai secara kekeluargaan menanyakan kondisi kelancaran perusahaan *stakeholders* yang bersangkutan. Dengan demikian, *stakeholders* yang kebanyakan terdiri dari pengusaha tersebut merasa diperhatikan.

Hal tersebut lumrah dilakukan, mengingat para pengusaha juga telah menunaikan kewajibannya untuk negara. Dengan pendekatan ini, maka segala informasi dan hubungan dengan pengusaha dapat terjalin lebih mudah. Misalnya informasi rokok ilegal, para pengusaha yang mengetahui keberadaan hal itu pun tak segan untuk melaporkan kepada petugas bea dan cukai untuk ditindak. Hal-hal kecil seperti inilah yang terkadang luput untuk diperhatikan.

Kantor yang memiliki moto IKHLAS (Integritas, Kesempurnaan, Harmonis, Lugas, Antisipatif, Sinergi) ini terdiri dari 24 pegawai. Tiga pegawai diantaranya sedang menjalani pendidikan D3 spesialisasi. “Saya senang dengan adanya pegawai yang melanjutkan belajar. Pertanda pembinaannya benar. Semakin banyak yang diklat atau sekolah, tandanya pembinaan berjalan baik. Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan salah satu cara menuju kantor percontohan,” tutur Benyamin sembari tersenyum.

Teks Pradany Hayyu



Foto
Andi Al Hakim

MEIRIJAL NUR

MERANTAU DEMI ILMU BARU

Berasal dari kampung di Sumatera Barat, untuk pertama kalinya, ia sendirian menuju kota besar Padang. Ia merantau demi mewujudkan impian meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk pertama kalinya pula, ia merasa ketakutan dan hampir putus asa saat harus sendirian merantau ke ibu kota pasca menamatkan pendidikan sarjana. Meski punya abang di Jakarta, ia terpaksa pergi sendirian, alias merantau, untuk menunjukkan kedewasaannya.

Berbekal satu tas yang diselempang dibahu yang berisi baju dan ijazah, ia bertekad ke ibu kota untuk bekerja. Tak lama bekerja di Jakarta, untuk kesekian kalinya, ia pun melanjutkan rantauannya ke luar negeri sendiri. Meski tak mudah dan penuh tantangan, merantau menjadi suatu nilai budaya yang sudah tertanam pada dirinya. Ia adalah Meirijal Nur, Direktur Penilaian pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Banyak lompatan-lompatan kehidupan dari hasil rantauannya yang membuatnya menjadi lebih arif dan bijaksana.

Terinspirasi dengan merantau dan keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, selepas kuliah Mei memilih

mengabdikan di Kementerian Keuangan. Pada saat yang sama, ia juga diterima bekerja di Bank dengan gaji yang lebih tinggi. Ia bertekad memilih bekerja sebagai PNS karena ingin mengasah kemampuan dan meningkatkan pengetahuannya sembari melanjutkan pendidikan. Tahun 1999, tekadnya pun terkabul. Mei berhasil menembus ketatnya beasiswa internal Kementerian Keuangan dan memilih Jepang untuk melanjutkan pendidikannya. Dari hasil merantainya ke luar negeri, ia banyak belajar nilai yang berharga untuk dibawa pulang.

Salah satu bekal nilai yang bisa ia terapkan dalam bekerja adalah etos kerja yang tinggi dari masyarakat Jepang. Selain itu, menjalin relasi yang baik juga menjadi nilai yang penting dalam bekerja. Tak kalah penting, Mei juga mengadopsi nilai yang lebih menghargai proses daripada hasil. Ia juga menekankan pentingnya mental untuk selalu belajar lebih baik lagi. “Untuk sesuatu yang baru, saya lebih suka mengatakan belum bisa daripada tidak bisa. Dampak psikologisnya berbeda. Walaupun sepertinya tidak mungkin (terwujud), tapi kalau kita sudah bilang ‘ah tidak bisa nih’, mental kita akan mencari alasan ketidakbisaan itu. Akhirnya mentalnya tertutup,” ucapnya. Kata-kata filosofis ini menjadi pegangan baginya dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul di kantornya. Dengan begitu, ia dapat mencari solusi terbaik untuk memecahkan setiap persoalan.

Membangun Kapabilitas Para Penilai

Pertama kali masuk di Kementerian Keuangan tahun 1993, Mei ditempatkan di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang kemudian berubah menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan

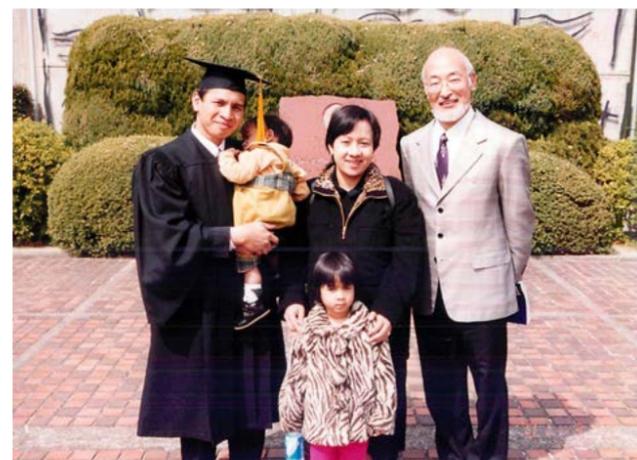
Lelang Negara (DJPLN). Pada waktu itu, ia terinspirasi oleh cita-cita atasannya untuk membangun unit manajemen aset. Selepas belajar dari Jepang, Mei berniat untuk mengembangkan kemampuan pegawai dan meningkatkan pengetahuan di bidang penilaian. Ia melakukan terobosan dengan mengundang pihak praktisi, seperti Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Sucofindo untuk mengisi diklat yang ia selenggarakan. Dengan begitu, ia dapat mengambil ilmu dan pengetahuan teknis untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan institusi. Berbekal ilmu yang diperoleh, Mei dan teman-temannya pun mengajar sendiri diklat penilaian untuk pegawai di seluruh Indonesia.

Usahanya tak sia-sia. Pada tahun 2006, DJPLN bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Momentum peran penilaian menjadi krusial ketika DJKN diminta untuk menilai semua aset negara. Sebabnya, pada tahun 2006 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memperoleh opini *disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang salah satu alasannya karena aset dalam neraca tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Sejak itu, Mei dan kawan-kawan pun melakukan tugas besar untuk melakukan *reinventory* dan revaluasi aset di seluruh Indonesia. Hasilnya, dengan nilai aset pada neraca yang lebih akuntabel dan memadai, Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mampu naik level menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2009 dan meningkat lagi menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2011. Sedangkan LKPP sendiri sudah berhasil naik peringkat dari opini *disclaimer* menjadi WDP pada tahun 2009.

Membagi Waktu dan Fokus

Bersama istrinya, Deska Insani Zaidarlis, dan ketiga anaknya, Mei merasa bersyukur atas kehidupan yang dijalani. Dahulu, saat ia baru menginjak Jepang, keluarganya tak lama ikut menyusul. Sembari menggali ilmu, Mei juga harus bisa fokus untuk membagi waktu dengan keluarganya. Tidak hanya itu, ia juga harus pintar mengelola keuangan dan prioritas pengeluarannya. Mei megisahkan ketika dirinya berangkat ke Jepang, ia baru mengetahui perihal kehamilan istrinya. Tak pelak, ia pun harus memperhitungkan keberadaan istri dan anak pertamanya, serta kelahiran anak keduanya. Namun, ia bersyukur berkat beasiswa yang diraihinya, biaya kelahiran istrinya ditanggung penuh. Bahkan, ia memperoleh uang asuransi dari pemerintah setempat.

Dengan uang beasiswa yang terbatas, Mei harus bisa banyak akal dalam mengatur keuangannya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ia mengandalkan efisiensi dari barang diskon. Di Jepang masa itu, Rabu merupakan hari libur umat Budha, sehingga pada hari Selasa banyak toko dan supermarket yang menjual sayuran dan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Mei pun tak melewatkan kesempatan itu. Di sisi lain, ia merasa beruntung karena di Jepang memiliki budaya yang mengenakan tarif untuk setiap barang elektronik dan perabotan yang dibuang. Karena aturan itu, tetangga Mei yang akan pergi ke luar negeri pun menawarkan seluruh barang-barangnya yang masih bisa dipergunakan kepada Mei untuk menghindari membayar biaya membuang barang. Karena sama-sama untung, Mei pun mengambilnya. Yang menarik, tetangganya tersebut



Mei saat melanjutkan pendidikan di Jepang.

Foto
Dok. Pribadi

malah justru berterima kasih kepada Mei. Akhirnya, mereka pun bersahabat hingga sekarang.

Pentingnya Kejujuran

Lahir dari keluarga sederhana, Mei dan tujuh saudaranya selalu merasa bersyukur. Bagi Mei, orang tuanya, Muhammad Nur dan Djaliasmi, merupakan sumber pembelajaran kehidupan. Ia sangat meneladani orang tuanya, baik ayah ataupun ibu. Baginya, ayahlah yang mengajari dan menanamkan nilai kejujuran. Ceritanya, sewaktu kecil, ayahnya selalu menaruh *segepok* lidi di bawah lemari. Lidi itu digunakan oleh ayahnya untuk memukul apabila ia melakukan tiga kesalahan. Yang pertama, jika ia pergi tanpa ijin terlebih dahulu kepada orang tua. Kedua, jika ia mencuri. Sedangkan yang ketiga, jika ia berbohong.

Pernah suatu ketika, Mei diuji oleh ayahnya dengan meletakkan uang Rp25 di lemari. Setelah itu, ayahnya menanyakan keberadaan uang tersebut. Mei pun dipanggil beserta adik dan kakaknya. Kalau tidak ada yang mengaku, ayahnya akan memukul semua saudaranya. Akhirnya, Mei mengaku untuk menyelamatkan adik dan kakaknya. Dengan begitu, ia menjadi belajar dan paham akan pentingnya kejujuran. Dalam kisah lain, ayahnya pernah mengantar Mei ke guru mengaji sembari memberikan lidi dan berpesan untuk memukul anaknya jika melakukan kesalahan. Namun, ia bersyukur, lidi itu belum pernah dipakai sampai ia khatam Al Quran.

Harapan

Mei berharap ke depan institusinya bisa menjadi lebih berkualitas. Targetnya, dalam lima tahun ke depan, minimal ada lima orang penilai dari DJKN dapat memperoleh sertifikasi internasional. Saat ini, ia sudah merintis kerja sama dengan RICS, yakni salah satu institusi yang mengeluarkan sertifikasi penilaian internasional yang berbasis di London. Dengan sertifikasi tersebut, ia berharap reputasi dan kualitas keahlian penilai di DJKN dapat diakui secara internasional, sehingga kepercayaan orang terhadap Kementerian Keuangan menjadi semakin tinggi. Pada akhirnya, hal itu akan mendorong DJKN untuk mewujudkan mimpinya menjadi *revenue center*. Sedangkan secara pribadi, ia menginginkan untuk menjalani hidupnya seperti air yang mengalir. “Setiap dimana kita berada, lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan dicatat sebagai pahala. Itu saja. Tidak muluk-muluk mimpinya,” ujarnya.

Teks Abdul Aziz

Infrastruktur yang Mendorong Pemerataan Ekonomi



Pemerintah memberikan perhatian serius pada program pembangunan infrastruktur dengan menambah alokasi anggaran dalam APBN. Pada tahun ini, belanja infrastruktur meningkat secara signifikan dari Rp170,9 triliun menjadi Rp350,3 triliun. Dalam sambutan pada acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2), Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk

meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur membuka banyak lapangan kerja dan membuka kesempatan bertumbuhnya UKM-UKM di daerah. “Saya sampaikan berkali-kali, fokus kita ada di infrastruktur. Saya meyakini, infrastruktur akan menumbuhkan investasi dan juga pemerataan kepada warga kita,” kata Presiden sebagaimana dilansir dari situs Sekretariat Kabinet.

Proses peninjauan pembangunan infrastruktur dilakukan langsung oleh para menteri Kabinet Kerja. Salah satunya adalah proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo, Seksi III Bawen-Salatiga yang direncanakan dibangun sepanjang 17,60 km. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan pada Jumat (17/2). “Hari ini saya bersama Menteri PUPR melihat secara fisik berbagai program jalan terutama tadi Semarang-Solo

sepanjang 73 km dan progress yang dihadapi, terutama dari sisi mensinkronkan masalah pembiayaan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan secara fisik,” ungkap Menkeu di sela-sela kegiatan tersebut.

Menurut Menkeu, jalan raya merupakan salah satu urat nadi terutama di daerah. Peningkatan aktivitas masyarakat dan ekonomi telah mendorong pertumbuhan mobilitas masyarakat antarkota, sehingga pembangunan jalan raya tak bisa ditunda. Jalan Tol Semarang-Solo akan menghubungkan Kota Semarang, Salatiga, dan Surakarta serta melewati tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Sukoharjo.

Jalan tol Semarang-Solo mulai dibangun tahun 2009 dengan total lintasan sepanjang 72,64 km. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jalan Tol Semarang dengan Jalan Tol Solo-Ngawi yang juga telah dimulai pembangunan konstruksinya. “Kita meminta kepada Menteri PUPR dan BPJT untuk memikirkan, nanti kita bersama-sama dengan Kementerian Keuangan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk bisa mampu membiayai secara baik dan merangkul resiko dengan baik juga, sehingga kemajuan fisiknya tidak terhalang dengan kendala pembiayaan,” ungkap Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu berharap bahwa dengan skema pembiayaan, baik melalui subsidi, penjaminan, maupun berbagai fasilitas yang dimiliki oleh BUMN di bawah Kementerian Keuangan dan juga dari penjaminan maupun dari *project development fund*, bisa digunakan oleh berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur.

Dalam kesempatan berbeda di Jakarta, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengungkapkan bahwa penguatan infrastruktur diharapkan dapat memberikan mobilisasi yang merata di seluruh Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan. Ketika berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub Tahun Anggaran 2018, Kamis (16/2), Wamenkeu menjelaskan bahwa permasalahan dalam pembangunan biasanya dari sisi pembiayaan. Oleh karena itu, Wamenkeu berharap agar Kemenhub juga dapat menggandeng pihak swasta, Badan Umum Milik Negara (BUMN), maupun Badan Layanan Umum (BLU) untuk menutup celah keuangan tersebut.

Kemenhub sebagai unit strategis dalam pembangunan infrastruktur dapat memanfaatkan momen untuk membantu

mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat. “Kita ingin melalui Kementerian Perhubungan, dapat membangun negara kita yang adil dan makmur,” kata Wamenkeu di Gedung Karya Kemenhub, Jakarta.

Wamenkeu berharap dalam rakornas Kemenhub, strategi belanja yang baik dapat dibahas bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas maupun efisiensi alokasi, demi terwujudnya perencanaan dan penyerapan anggaran yang lebih baik.

Kegiatan perencanaan tahun anggaran 2018 yang telah dilakukan di awal 2017 mendapat apresiasi dari Wamenkeu. Apalagi proses perencanaan tersebut dilakukan tanpa mengganggu kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 dan tetap melaksanakan anggaran tahun 2017.

Lebih jauh, wujud pemerataan pembangunan infrastruktur tampak dari ekspedisi yang dilakukan pemerintah pada tiga ruas jalan di Papua. Dilansir dari situs Kementerian PUPR, pemerintah mempunyai komitmen kuat untuk mendorong pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini juga menjadi bagian dari Agenda Nawacita yakni membangun dari pinggiran dan meningkatkan konektivitas.

Tujuan ekspedisi tiga jalan di Papua dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik tentang progres peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan, serta infrastruktur terkait di Papua dan Papua Barat. Ketiga jalan

Bendungan Logung di Kudus merupakan salah satu contoh belanja pemerintah di bidang infrastruktur.

Foto Langgeng W.P.



tersebut yaitu Merauke-Tanah Merah-Oksibil sepanjang 688,07 kilo meter (km), perbatasan Papua Barat- Nabire-Waghete arah Timika-Enarotali sepanjang 275,5 km, dan Sorong-Pelabuhan Arar-Manokwari sepanjang 594,81 km.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pembangunan jalan ini untuk membuka keterisolasian wilayah yang dampak langsungnya dapat dirasakan, antara lain memperlancar arus logistik dan menurunkan tingkat kemahalan barang di Papua dan Papua Barat. Alokasi anggaran infrastruktur tahun 2017 untuk Provinsi Papua sebesar Rp4,96 triliun. Alokasi tersebut terbagi menjadi alokasi untuk sumber daya air Rp411 miliar, jalan dan jembatan Rp3,72 triliun, permukiman Rp132 miliar dan perumahan Rp85,7 miliar. Sementara itu, alokasi Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,64 triliun, terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp343 miliar, jalan dan jembatan Rp1,51 triliun, permukiman Rp129 miliar.

Total alokasi pembangunan infrastruktur dari Kementerian PUPR untuk Pulau Papua mencapai Rp7,6 triliun, pembangunan infrastruktur di Pulau Papua juga didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 sebesar Rp 2,18 triliun.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan belum lama ini, Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengapresiasi peningkatan porsi belanja infrastruktur dalam APBN. Namun demikian, Bhima berharap pemerintah dapat mendalami skema pendanaan lain di luar APBN untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur sebesar Rp5.500 triliun

sampai dengan tahun 2019. "Diperlukan sumber pendanaan lainnya untuk pembangunan infrastruktur, termasuk dengan skema *public private partnership* (PPP). Kerja sama pemerintah swasta harus lebih ditingkatkan, sehingga ketergantungan pembangunan infrastruktur melalui APBN perlahan berkurang," kata Bhima.

Bhima juga menilai koordinasi antarkementerian dalam pembangunan infrastruktur perlu terus diperbaiki. Beberapa kementerian dengan alokasi belanja infrastruktur yang cukup besar adalah Kemenhub dan Kementerian PUPR. Dalam pandangan Bhima, beberapa program pembangunan yang terlambat, seperti proyek 35.000 MW, menunjukkan belum kuatnya koordinasi antara kementerian dan BUMN pelaksana dari mulai proses perencanaan proyek hingga teknis lapangan. "Koordinasi sangat perlu dilaksanakan melalui berbagai skema yang mungkin. Pemerintah bisa juga melakukan *working group* lintas kementerian," ujar Bhima.

Skema *working group* dapat dilakukan dengan mencontoh skema kerja sama pembangunan dengan negara mitra Korea Selatan. Hambatan-hambatan teknis seperti skema pembiayaan, pengadaan lahan, pengadaan barang dan jasa, menurut Bhima, dapat diselesaikan dengan *working group*. Melalui cara itu, ada garis koordinasi yang akan lebih jelas terlihat dan mencakup semua pihak yang terkait.

Teks Dwinanda Ardhi



Bhima Yudhistira Adhinegara,
Pengamat INDEF

"Tantangan sektor infrastruktur yang paling *urgent* adalah soal pembiayaan yang tidak bisa lagi mengandalkan APBN terus-menerus. Apalagi penerimaan negara selama dua tahun terakhir semakin menghadapi tantangan. Unsur swasta dan masyarakat perlu lebih dilibatkan. Swasta bisa dilibatkan melalui skema PPP, sehingga pendanaannya menjadi lebih bervariasi. Instrumen pendanaan infrastruktur juga perlu terus didorong agar makin variatif.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah di tahun 2017 merupakan momentum bagi pemerintah daerah untuk memainkan peran lebih untuk membangun infrastruktur. Sayangnya, dengan anggaran yang besar, belanja infrastruktur daerah masih terbatas. Bahkan berdasarkan laporan APBD 2016, ada 131 daerah dengan rasio belanja pegawai terhadap total belanja di atas 50 persen. Harapannya, kondisi ini bisa diatasi dengan cara pemberian sanksi yang tegas bagi daerah yang belum mampu meningkatkan porsi belanja infrastrukturnya.

Kunci sinergi lainnya adalah keterlibatan daerah lebih besar dalam setiap proses pembangunan infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan sampai praktik teknis di lapangan. Dengan keterlibatan tersebut, peran aktif pemerintah daerah diharapkan meningkat."



MELAKUKAN MONEV KINERJA PENGANGGARAN?

monev.anggaran.depkeu.go.id/SPOC/

Menyelesaikan Persoalan Keuangan Daerah

Teks Joko Tri Haryanto*)



Penyelesaian berbagai persoalan keuangan daerah akan mendukung rencana pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur.

Foto
Langgeng W.P.

Jika tidak ada aral melintang, Indonesia akan menjadi tuan rumah Sidang Tahunan Indonesia Monetary Fund-World Bank (ST IMF-WB) di Nusa Dua, Bali pada 2018. Rencananya, rangkaian ST IMF-WB tersebut akan dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 188 negara serta perwakilan dari berbagai level termasuk lembaga pemeringkat kredit, investor, LSM, dan sektor swasta. Mengingat penyelenggaraan ST IMF-WB tinggal tahun depan, maka kondisi 2017 menjadi sangat krusial. Diharapkan pemerintah, melalui APBN 2017, mampu membangun modalitas domestik yang memadai dalam mendukung terselenggaranya ST IMF-WB dengan baik. Untungnya, pemerintah secara tidak langsung sudah menyusun filosofi APBN 2017 yang selaras dengan tujuan ini. Dengan tetap mengusung pembangunan infrastruktur di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, sedianya akan dibangun jalan sepanjang 815 km, jembatan sepanjang 9.399 km, 13 bandara, fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi, jalur kereta api tahap I dan lanjutannya, serta modernisasi terminal penumpang di tiga lokasi lanjutan.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp377,8 triliun atau hampir setara dengan 18,6 persen dari total belanja negara. Dibandingkan waktu yang sama dalam lima tahun terakhir, alokasi tersebut meningkat sangat signifikan. Di tahun 2012 misalnya, alokasi belanja infrastruktur masih 9,8 persen total belanja negara. Alokasi itu naik 14,2 persen pada 2015 dan 15,2 persen pada 2016. Menariknya, kenaikan persentase alokasi pada 2017 juga didukung dengan adanya kewajiban pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang awalnya mayoritas habis hanya untuk belanja gaji dan operasional semata. Ini artinya semangat pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja daerah mulai terealisasi.

Pada 2016, nilai besaran investasi proyek prioritas mencapai Rp912,7 triliun. Beberapa proyek strategis di antaranya program pembangkit listrik 35.000 MW; pembangunan kilang minyak Pertamina di Cilapacap, Balikpapan, dan Tuban; Kereta Cepat Jakarta-Bandung; LRT Jakarta-Bogor-Bekasi; Pelabuhan Kuala

Tanjung; Jalan Tol Pekanbaru-Dumai; Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono; serta Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.

Percepatan pembangunan tersebut memang dirancang dalam upaya mewujudkan tema utama "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas". Adapun strategi yang ditempuh di antaranya memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global, serta mengendalikan risiko serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Dari sisi daerah, pemerintah juga melakukan banyak perbaikan, khususnya dari sisi manajemen keuangan daerah. Pemerintah mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk tidak sekadar mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bunga dana kas daerah yang mengendap di perbankan karena hanya akan menjadi dana mengendap (*idle fund*). Hal ini terbukti ketika posisi nilai simpanan pemda di sektor perbankan hingga akhir Oktober 2016 masih mencapai Rp206,85 triliun dengan simpanan pemerintah kabupaten mencapai Rp113,71 triliun, pemerintah provinsi sebesar Rp58,47 triliun, dan simpanan pemerintah kota Rp34,67 triliun.

Pada akhir November 2016, posisi tersebut memang menurun menjadi Rp198,8 triliun dan ditargetkan untuk di bawah Rp80 triliun di akhir 2016. Namun, hal ini sepertinya masih menyisakan persoalan serius karena senantiasa berulang setiap tahun. Oleh karena itu, kinerja daerah seyogyanya tidak sekadar diukur dari total PAD semata, tetapi juga dihitung dari persentase pajak dan retribusi daerah yang berhasil dikumpulkan. Semakin besar persentase tersebut menandakan munculnya aspek kemandirian daerah dan sebaliknya.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah menginjak dasawarsa kedua. Sudah banyak coretan sejarah yang diukir. Munculnya banyak gubernur, bupati, dan walikota yang inovatif menjadi contoh positif dari pelaksanaan desentralisasi di era reformasi. Namun demikian, beberapa dampak negatif juga wajib untuk terus dievaluasi bersama. Masih rendahnya derajat pelaksanaan desentralisasi fiskal serta makin tingginya aspek ketergantungan terhadap dana pusat misalnya dapat menjadi prioritas utama. Berdasarkan hitungan penulis, sejak tahun 2008 hingga 2014, derajat desentralisasi fiskal di Indonesia hanya bergerak dari angka 0,17 hingga 0,23 atau masuk dalam kategori *less good*.

Dilihat dari data per daerah secara akumulatif, hanya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki derajat desentralisasi fiskal *very good* dengan nilai 0,54 hingga 0,70. Kemudian Provinsi Banten, Provinsi Jatim, Provinsi Jabar, dan Bali masuk dalam kategori *good*. Sementara sisanya masuk seluruhnya dalam kategori *less good* dan *not good*. Hal yang sama juga terefleksikan dalam derajat kemandirian daerah, di mana Provinsi DKI Jakarta memiliki diskresi penuh dalam pengelolaan

APBD-nya, sementara Provinsi Banten, Jabar, Jatim, dan Bali masuk dalam kategori *participatory*. Daerah lainnya masuk dalam kategori *consultative* dan *instructive*.

Prioritas berikutnya terkait dengan fenomena dana *idle*. Dalam kacamata penulis, munculnya dana *idle* ini menandakan adanya mekanisme yang kurang sesuai antara pemerintah pusat dengan pemda. Di level pusat, pemerintah berusaha sekuat mungkin mengefisienkan penganggarnya demi memperlebar *fiscal space* dengan harapan dapat menjaga momentum pertumbuhan di daerah. Sementara di sisi lain, pemda justru tidak menangkap hal tersebut sesuai yang diharapkan.

Banyak permasalahan yang menjadi penyebab utamanya. Efek gerakan nasional pemberantasan korupsi sering dijadikan alibi utama. Belum lagi persoalan kehati-hatian para aparat pemda dalam menghadapi proses lelang, khususnya terkait dengan banding dan sanggahan. Belum lagi persoalan konflik politik di daerah menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Di suatu daerah, aktivitas pemerintah biasanya akan lumpuh ketika pasangan kepala daerah kemudian memutuskan untuk berpisah di tengah jalan dan siap beradu di pilkada berikutnya.

Kondisi ini jelas perlu segera diselesaikan. Pemerintah pusat harus segera memikirkan mekanisme seperti apa yang dapat dijadikan alat *reward and punishment* bagi daerah, sehingga ke depan mampu berlomba-lomba mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Konversi pencairan transfer ke daerah secara kas menjadi Surat Berharga Negara (SBN) bagi daerah yang kinerja pengelolaan anggarannya buruk, sejatinya hanya menjadi satu instrumen kecil bagi kebijakan yang seharusnya lebih

komprehensif.

Reformasi lainnya juga wajib dilakukan, termasuk sisi perbaikan sistem penganggaran di pemerintah pusat, sehingga dana akan tersalurkan tepat waktu. Keterlambatan penyaluran dana pemerintah pusat ke daerah turut menjadi andil dalam peningkatan endapan dana pemda di sektor perbankan. Di samping itu, faktor lainnya adalah usulan kepada daerah untuk wajib mengalokasikan minimal 25 persen anggaran daerah, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) kepada sektor infrastruktur. Reformasi menjadi makin *urgent* ketika pemerintah memutuskan untuk tetap menambah alokasi transfer ke daerah dan dana desa menjadi Rp764,9 triliun, melebihi alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp763,6 triliun.

Keterbukaan dan saling pengertian untuk memperbaiki permasalahan masing-masing menjadi kata kunci yang mujarab dalam mengatasi persoalan ini secara bijaksana. Jangan sampai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang awalnya diharapkan dapat menciptakan aspek kemandirian di daerah, justru berbuah bom waktu yang dapat membahayakan aspek *sustainable fiscal* di Indonesia ke depannya.

Yang juga dibutuhkan adalah pola pikir *out of the box* demi menjaga kesinambungan alokasi anggaran infrastruktur yang memadai. Jika hal ini dapat dijalankan, ke depannya penulis yakin bangsa Indonesia akan mampu mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi yang hilang satu persen menurut versi World Bank, sekaligus mencapai status negara dengan skala ekonomi terbesar ke-7 di dunia sebagaimana yang sudah disampaikan dalam visi misi "Bersama Indonesia Maju 2030".

SUKUK NEGARA RITEL

SERI SR-009 TAHUN 2017

Produk Investasi Berbasis Syariah yang Aman dan Menguntungkan



"Membangun Karakter, Mencintai Negeri"

Masa Penawaran: 27 Februari s.d 17 Maret 2017 | Penerbitan: 22 Maret 2017 | Pembayaran Imbalan: Tanggal 10 per bulan
Jatuh Tempo: 10 Maret 2020 | Minimum Pemesanan: Rp5.000.000 | Maksimum Pemesanan: Rp5.000.000.000

PEMBELIAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 TAHUN 2017 DAPAT DILAKUKAN DI 22 AGEN PENJUAL DI BAWAH INI:



*) peneliti pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal



Menjadi Alumni yang Berkontribusi

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggelar Malam Welcoming Alumni di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin (06/02). Acara ini ditujukan untuk menyambut kedatangan alumni LPDP serta sebagai wadah bagi mereka untuk bertemu, menjalin *networking*, dan saling memberikan inspirasi untuk membangun Indonesia. Bhima Yudhistira Adhinegara, penerima beasiswa LPDP dan alumni University of Bradford, Inggris, menjadi salah satu peserta yang hadir dalam kesempatan itu. Bagi Bhima—pangolin akrabnya—pesan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada malam Welcoming Alumni sangat bermakna.

“Welcoming Alumni menjadi momen penyadaran diri bagi saya. Setelah belajar dengan beasiswa LPDP, ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap alumni dengan kerja cerdas dan nyata di tengah masyarakat,” kata anak muda kelahiran Pamekasan, 3 November 1989 itu. Bhima memandang penting sinergi antara alumni dari berbagai bidang seperti yang disampaikan Menkeu dalam sambutannya. Untuk mendorong sinergi itu, dia turut berkontribusi langsung dengan mengembangkan jaringan alumni LPDP

lewat lembaga *think tank* Mata Garuda Institute. “Harapannya agar bisa keluar ide-ide besar dari seluruh *awardee* LPDP yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia,” ujar lulusan program S1 dari International Undergraduate Program, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

Di samping melalui Mata Garuda, Bhima juga aktif berkontribusi sebagai ekonom dan peneliti di INDEF (Institute for Development of Economics and Finance). Dia banyak melakukan riset ilmiah dan membangun opini-opini yang konstruktif agar tujuan dari pembangunan ekonomi sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa. “Saya telah mengabdikan diri di INDEF sejak sebelum berangkat sekolah. Jalur pengabdian ini saya rasa yang paling pas hingga saat ini,” kata Menteri Riset Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM tahun 2012 itu. Bhima rajin menuangkan gagasan dan hasil risetnya di berbagai media nasional. Wajahnya juga mulai *bersliweran* di berbagai program berita ekonomi di layar kaca.

Memilih LPDP

Pada 2015, Bhima mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc) in Finance dari University of Bradford dengan

predikat *Graduate with Merit*. Dia memilih mendaftar beasiswa LPDP untuk membiayai studinya karena jaringan intelektual yang dibangun di antara para *awardee*-nya terus tumbuh secara eksponensial. LPDP juga memiliki nilai nasionalisme yang kuat. “Artinya ada rasa tanggung jawab yang besar kalau sudah menjadi *awardee* LPDP, wajib pulang dan berbakti untuk negeri,” kata Bhima.

Bhima mempersiapkan pendaftaran beasiswa LPDP kurang lebih selama enam bulan. “Saya harus pulang pergi antara Jakarta dan Jogger untuk mencari informasi dan persiapan IELTS,” ujarnya. Di samping itu, dia juga menyisihkan waktu di perpustakaan untuk mempelajari buku-buku teks yang akan digunakan nantinya di kampus tujuan. Membangun komunikasi dan melakukan konsultasi dengan beberapa alumni di kampus yang diincar juga dilakukan Bhima. “Intinya saya ingin persiapan maksimal, agar tidak malu jadi *awardee* LPDP jika terpilih,” ujarnya.

Bhima mengambil program MSc in Finance di University of Bradford dikarenakan kampus tersebut memiliki *triple crown accreditation* sekaligus, yaitu Equis (*European Quality Improvement System*), AMBA (*The Association of MBAs*), dan AACSB (*The Association to Advance*

Collegiate Schools of Business). Selain soal *rating*, iklim belajar di Bradford dan berbagai fasilitas yang ada, salah satunya *trading room*—ruang perdagangan bursa saham—menjadi daya tarik tersendiri. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan Bhima adalah keberadaan dua orang dosen di sana yang telah mempublikasikan jurnal dengan topik sama dengan rencana tesisnya.

Di Bradford, fokus studi Bhima—menyangkut pasar keuangan dan perbankan. Alasannya sederhana, ia ingin memberikan masukan yang berkualitas bagi pemerintah dan industri keuangan. “Saat ini industri keuangan berubah sangat cepat dan membutuhkan respons dari sisi regulasi dan praktik bisnis di lapangan,” kata dia.

Bhima telah lama jatuh cinta dengan bidang keuangan, tepatnya sejak berkuliah di UGM. Dia tertarik untuk mendobrak paradigma bahwa industri keuangan hanya berkecukupan soal cara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko yang minim. Di situ, Bhima melontarkan kritik terhadap pandangan bahwa paradigma industri keuangan menjadi akar penyebab ketimpangan. “Saya bertekad untuk mengubah wajah industri keuangan di Indonesia agar *pro poor* sekaligus *pro growth*,” ujar Bhima.

Proses perkuliahan

Selama menjalani perkuliahan, Bhima mengaku hampir tidak mengalami kesulitan yang berarti. Pencairan dana beasiswa LPDP selalu tepat waktu. Kendala gegar budaya juga hampir tidak terjadi karena Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Inggris sudah sangat baik dalam menyambut mahasiswa-mahasiswa baru. “Ada rasa saling tolong menolong antarmahasiswa di sana dan itu sangat membantu,” kata dia.

Bhima sempat terpilih menjadi Ketua PPI Inggris *chapter* Bradford. Amanah yang diemban selama satu tahun banyak memberikan manfaat baginya, terutama

dalam hal menambah jaringan pelajar di Inggris. Bersama teman-teman pelajar dari beberapa universitas di Inggris, Bhima sempat membuat kelompok diskusi Lingkar Studi Cendekia (LSC). Kelompok epistemik tersebut dibentuk dengan semangat mengkaji dan mengkritisi perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan terbaru di Indonesia. “Saat ini LSC sudah berkembang menjadi kelompok interdisipliner dengan diskusi rutin dan jurnal ilmiah yang makin intensif diterbitkan,” ujarnya. Bhima juga aktif dalam berbagai forum diskusi yang diadakan oleh kampus di bidang perburuhan, ekonomi untuk keadilan sosial, dan forum investor aktivis (berisi investor muda pro lingkungan dan pro negara kesejahteraan). Pada aktivitas di luar Bradford, Bhima juga sempat terlibat dalam beberapa konferensi internasional, salah satunya di Oxford. Konferensi tersebut membahas persoalan ekonomi di regional Afrika. Saat kembali ke Indonesia, ilmu dan pengalaman organisasi selama di Inggris diakuinya sangat bermanfaat untuk mempertajam analisis ekonomi dan memperluas jaringan.

Selama menempuh studi, Bhima juga sempat menorehkan prestasi dengan terpilih menjadi *best presenter* pada acara Indonesian Scholars International Convention di King’s College London. Saat itu, dia memaparkan hasil tesis soal ‘Investor Aktifis’ atau investor yang peduli soal keadilan sosial.

Menurut Bhima, pelajaran paling penting yang didapatkannya dari perkuliahan di Inggris adalah metode belajar yang sangat berbeda. Di sana, mahasiswa dituntut untuk lebih pro aktif dalam mencari materi dan berdiskusi. Peran dosen hanya sebatas fasilitator. Tingkat keberhasilan lebih ditentukan oleh upaya mahasiswa. Metode seperti ini tepat untuk memacu produktivitas dan kreativitas pelajar.

Hal yang juga menjadi pelajaran penting bagi Bhima adalah kesempatan

untuk berada dalam iklim intelektual sosial yang kuat. Mahasiswa harus punya tanggung jawab sosial. “Kita bukan hanya menjadi mahasiswa yang pintar, melainkan juga mahasiswa yang mempunyai kesadaran bahwa ilmu harus digunakan kebaikan bersama,” katanya.

Pesan

Bhima berharap ada lebih banyak *awardee* dari pulau terluar Indonesia yang bisa menjadi bagian dari keluarga besar LPDP. Menurut dia, program afirmasi harus terus diperbesar porsinya, agar *awardee* yang pulang ke daerah masing-masing bisa lebih banyak. “Membangun bukan hanya di ibu kota, tapi juga dipusatkan ke daerah-daerah terluar agar ketimpangan pembangunan bisa turun signifikan,” kata Bhima.

Bhima memiliki saran untuk anak-anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan beasiswa LPDP. “Para pelamar sebaiknya benar-benar mempersiapkan rencana studi dengan matang. Kalau perlu persiapan untuk mendaftar LPDP adalah satu atau dua tahun sebelumnya,” ujar Bhima. Pelamar LPDP juga dianjurkan memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun, sehingga kompetensi sudah terukur dan teruji. Ketika kembali setelah lulus, *awardee* diharapkan langsung dapat berkontribusi untuk membangun negeri. “Jangan sampai ada cerita *awardee* LPDP yang menganggur setelah selesai masa studi,” kata Bhima menutup perbincangan.

Teks Dwinanda Ardh



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpd@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Reformasi Perpajakan untuk Bisnis Teknologi Informasi

Teks

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Sekretariat Jenderal

Para mahasiswa Tiongkok di tahun 1990-an menjadikan tanggal 11 November sebagai Hari Jomblo Nasional (*Singles Day*). Mengambil momentum tersebut, Alibaba, perusahaan *e-commerce* terbesar di Tiongkok sejak tahun 2009 memilih *Singles Day* sebagai hari belanja *online*. Pada *Singles Day* 2016, Alibaba berhasil menjual produk sejumlah 13,4 milyar dollar AS (Rp 178 triliun) dalam waktu kurang dari 15 jam.

Indonesia tidak ketinggalan menjadikan 11 November sebagai Hari Belanja *Online* Nasional (Harbolnas) dengan memberi diskon besar-besaran. Pada Harbolnas 2016, beberapa perusahaan *e-commerce* menikmati lonjakan pembeli. Contohnya perusahaan Zalora, menerima lonjakan pengunjung 565 persen dibanding tahun sebelumnya. MatahariMal.com mencatat kenaikan transaksi 4,5 kali dari hari biasa. Pada hari terakhir Harbolnas Bukalapak.com, berhasil meningkatkan transaksi hariannya menjadi sebesar Rp300 miliar.

Selain melalui *online market place*, transaksi *digital* juga diperoleh dari pemasangan iklan pada media sosial (medsos). Sebagian besar penggunaan aplikasi medsos dilakukan melalui telepon seluler (ponsel). Di Indonesia, pada tahun 2016, jumlah pengguna telepon pintar diperkirakan 87,6 juta orang atau setara dengan 34 persen total jumlah penduduk.

Contoh sistem yang banyak digunakan saat ini adalah *location-aware systems* pada layanan transportasi *online*. Contoh lainnya adalah Waze atau GoogleMap yang membantu seseorang mencari lokasi jalan dan rute alternatif bila terjadi kemacetan.

Kebiasaan pengguna ponsel telah menciptakan bisnis baru yang disebut *big data*. Kebiasaan tersebut berwujud basis data berisi informasi, pola, serta tren perilaku pengguna

yang bermanfaat untuk pemasaran, pengembangan layanan, atau perencanaan strategis.

Walmart, raksasa supermarket di Amerika Serikat, mengumpulkan 2,5 *petabytes* data dari 1 juta pelanggan setiap jamnya. Kumpulan data tersebut diperoleh dari kunjungan ke situs, medsos, kartu pelanggan, dan data penjualan. Dengan *big data analytics*, Walmart berhasil menerapkan terobosan layanan yang berujung pada peningkatan pendapatan. Misalnya, efisiensi persediaan barang serta manajemen rekomendasi produk. Analisa *big data* juga digunakan untuk memberi informasi kepada orang yang tepat dalam hal zona wilayah, kebiasaan/hobi, golongan usia dan jenis kelamin.

Berbagai aplikasi tersebut ditunjang dengan infrastruktur teknologi berupa komputasi awan (*cloud computing*). Aplikasi *mobile* membutuhkan jaringan yang handal, media penyimpanan yang besar, dan penyedia layanan yang dinamis dengan biaya serendah mungkin. Semua hal ini terjawab dengan komputasi awan.

Kecanggihan teknologi informasi juga memunculkan usaha rintisan bidang layanan keuangan digital yang disebut *financial technology* (*Fintech*). Melalui

Fintech, pelanggan bisa mendapat layanan pembayaran, transfer, pinjaman dan bahkan berinvestasi tanpa harus menjadi nasabah bank konvensional. Pertumbuhan perusahaan *Fintech* sangat cepat. Pada tahun 2016 telah tercatat 156 perusahaan dengan nilai transaksi mencapai 15,02 miliar dollar AS atau tumbuh 24,6 persen dibanding tahun 2015.

Kesiapan Ditjen Pajak

Bagaimana kesiapan Ditjen Pajak mengantisipasi perubahan cara transaksi tersebut? Sebenarnya sudah ada payung hukum yang bisa digunakan. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa Bentuk Usaha Tetap dapat berupa komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan usaha melalui internet. Namun, aturan pelaksanaan UU ini belum ada sehingga pada prakteknya tidak dapat digunakan.

Contoh lainnya adalah bisnis aplikasi sewa kendaraan dengan *location-aware system* (misalnya Gojek dan Uber). Pertanyaan sederhana terkait bisnis ini adalah apakah pengemudinya masuk dalam kategori pegawai dari perusahaan penyedia jasa atau mereka adalah 'pengusaha' sewa kendaraan? Hal ini akan mempengaruhi kewajiban perpajakannya, apakah dipotong oleh perusahaan melalui PPh pasal 21 atau disetor sendiri oleh 'pengusaha' melalui PPh pasal 25.

Hal lain yang juga perlu diantisipasi adalah bisnis *online market place*. Sebagai contoh, dari satu juta penjual di Bukalapak, pada 2016 tercatat transaksi sebesar Rp10 triliun. Jika Ditjen Pajak tidak dapat mendeteksi para penjual di situs tersebut, maka banyak potensi pajak yang hilang. Selama ini, Ditjen

Ditjen Pajak membutuhkan peraturan baru, seperti pajak sewa server di komputasi awan yang tidak diketahui lokasinya, pajak atas digital download, dan pemasangan iklan di medsos.



Pajak masih memburu pemilik *online market place* saja, padahal pedagang di situs tersebut ada banyak dengan omset penjualan yang besar.

Reformasi Perpajakan untuk Bisnis Digital

Perkembangan *e-commerce*, medsos, *location-aware system*, *big data analytic*, komputasi awan, dan *Fintech* dapat dijadikan acuan dalam reformasi pajak di bidang teknologi informasi. Ditjen Pajak membutuhkan peraturan baru, seperti pajak sewa server di komputasi awan yang tidak diketahui lokasinya, pajak atas *digital download*, dan pemasangan iklan di medsos.

Dengan berkembangnya pasar *online*, sebaiknya dirumuskan juga aturan mainnya. Misalnya, pengelola *online market place* diwajibkan memberi data pedagang yang penjualannya telah mencapai nilai tertentu kepada Ditjen Pajak. Ketentuan ini sudah diberlakukan di Amerika Serikat.

Pola kerja Ditjen Pajak juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu dalam rangka pendataan Wajib Pajak, Ditjen Pajak melakukan sensus dengan mendatangi perumahan/perkantoran di wilayah kerjanya. Untuk bisnis *online*, sensus bisa dilakukan dari mana saja.

Pegawai Ditjen Pajak juga harus meningkatkan pengetahuannya mengenai forensik digital, audit IT dan pembayaran elektronik. Sudah selangkahnya pula ada satu unit organisasi yang fokus mencermati perkembangan teknologi informasi. Selain untuk pengawasan, unit ini juga dapat mengkaji peningkatan pelayanan dengan menggunakan teknologi terkini.

Kemenkeu Naikkan Santunan Korban Kecelakaan Hingga 100%

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Penanggungung Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai Danau, Feri/ Penyeberangan, Laut, dan Udara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK. 010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Dalam rangka meningkatkan perlindungan dasar kepada masyarakat serta mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan tingkat inflasi, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang digunakan sebagai dasar penentuan besaran santunan dan iuran wajib, serta sumbangan wajib bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan. Baik yang terjadi di dalam alat angkutan jalan yang ditumpangnya, maupun yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan. Hal ini tertuang dalam PMK Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Penanggungung Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (PMK Nomor 15/2017), serta PMK Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (PMK Nomor 16/2017).

Secara resmi, kedua PMK tersebut

mencabut dan menyatakan bahwa PMK sebelumnya yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi. Melalui peraturan baru ini, Kementerian Keuangan bersama PT Jasa Raharja (Persero), sebagai perusahaan yang ditunjuk Pemerintah untuk menjalankan program dana pertanggungungan wajib kecelakaan, memandang perlu untuk meningkatkan nilai santunan. Besaran santunan kepada korban kecelakaan mengalami kenaikan hingga 100 persen tanpa diikuti dengan kenaikan iuran sumbangan. Sebagaimana diketahui, dana pertanggungungan kecelakaan penumpang dihimpun dari iuran wajib dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang, sedangkan dana kecelakaan lalu lintas jalan dihimpun dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Peningkatan nilai santunan dilakukan karena telah terjadi perubahan faktor kebutuhan hidup dan inflasi, seperti kenaikan pada biaya rumah sakit, biaya obat-obatan, dan biaya untuk proses

penguburan. Selain peningkatan nilai santunan, pemberian manfaat baru berupa penggantian biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan penggantian biaya ambulans yang dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan jiwa korban di saat kritis juga dipertimbangkan dalam penyusunan PMK ini.

Pada sisi lain, Kementerian Keuangan dan PT Jasa Raharja (Persero) juga harus mempertimbangkan stabilitas daya beli masyarakat, sehingga peningkatan nilai santunan dan pemberian manfaat baru tidak diikuti dengan peningkatan besaran Iuran Wajib (IW) maupun peningkatan besaran Sumbangan Wajib (SW). Tidak hanya itu, data statistik selama 8 (delapan) tahun terakhir turut dipertimbangkan. Tercatat jumlah penumpang angkutan umum dan jumlah kendaraan bertambah secara signifikan. Namun, proporsi jumlah penumpang yang mengalami kecelakaan atau jumlah korban kecelakaan lalu lintas cenderung menurun.

Santunan Naik Hingga 100 Persen

Kenaikan besaran santunan hingga 100 persen diperuntukkan bagi korban kecelakaan penumpang di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan, laut dan udara, serta bagi korban kecelakaan lalu lintas. Peningkatan tersebut berupa santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia, penggantian biaya perawatan dokter, serta penggantian biaya penguburan apabila tidak ada ahli waris. Adapun tambahan manfaat baru bagi korban kecelakaan adalah berupa penggantian biaya ambulans dan

penggantian biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Selanjutnya, bagi korban kecelakaan penumpang untuk alat angkutan umum penumpang di udara, besar santunan dan tambahan manfaat baru diberikan berupa santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia. Namun, penggantian biaya perawatan dokter tidak mengalami kenaikan (tetap), sedangkan penggantian biaya penguburan (jika tidak ada ahli waris) mengalami kenaikan hingga 100 persen. Tidak hanya itu, korban juga mendapatkan penggantian biaya ambulans dan penggantian biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Sementara IW dan SW tidak mengalami kenaikan (tetap).

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 15/2017, besaran santunan bagi korban meninggal dunia mencapai Rp50 juta, cacat tetap Rp50 juta, biaya perawatan Rp20 juta, penggantian biaya P3K Rp1 juta, penggantian biaya ambulans Rp500 ribu, dan biaya penguburan (jika tidak ada ahli waris) sebesar Rp4 juta. Sementara bagi penumpang angkutan udara, jumlah tanggungan yang diatur dalam PMK Nomor 15/2017 Pasal 4 tidak berubah, yaitu bagi korban meninggal dunia Rp50 juta, cacat tetap Rp50 juta, dan biaya perawatan Rp25 juta.

Penutup

Kenaikan santunan yang diberikan kepada ahli waris korban kecelakaan meninggal dunia dan kepada korban sangat dibutuhkan. Hal ini untuk

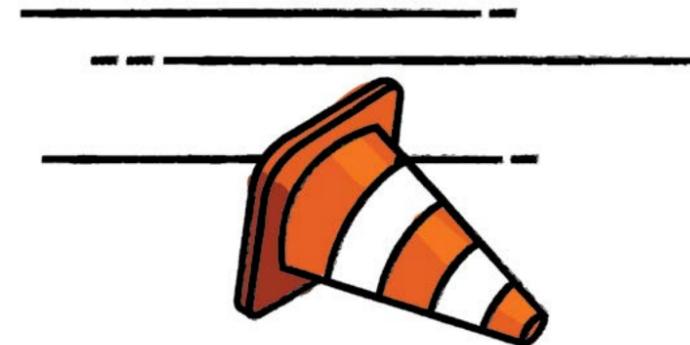
meningkatkan perlindungan dasar bagi masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih lagi, besaran santunan belum pernah mengalami kenaikan sejak 2008. Dari sisi keuangan PT Jasa Raharja (Persero), peningkatan besaran santunan dimungkinkan. Sebab pemerintah melihat peningkatan jumlah penumpang angkutan disertai dengan penurunan tingkat kecelakaan.

Adanya manfaat baru berupa penggantian biaya P3K dan biaya ambulans yang belum pernah ada sebelumnya bisa memberikan kepastian pembayaran bagi penolong korban. Sebab selama ini, sebagian korban kecelakaan tidak berhasil diselamatkan karena terlambatnya penanganan disertai ketidakjelasan pembiayaan.

PMK Nomor 15/2017 dan PMK Nomor 16/2017 ditetapkan pada 13 Februari 2017 dan berlaku efektif pada 1 Juni 2017. Dari segi waktu, pemberlakuan ketentuan dinilai tepat. Sebab bersamaan dengan libur lebaran yang akan berlangsung pada pekan keempat Juni 2017. Bagi PT Jasa Raharja (Persero), rentang waktu tiga bulan perlu dimanfaatkan secara efektif guna melakukan persiapan yang diperlukan. Diantaranya penyesuaian sistem dan teknologi pendukung, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai jumlah santunan dan manfaat baru sehingga semua pihak memahami hak dan kewajibannya atas iuran dan santunan yang diberikan PT Jasa Raharja.

Teks Budi Sulistyio

Ilustrasi
Wardah Adina



Musisi yang Terlahir dari Kanal Youtube



Foto
Anas Nur Huda

Kapan lagi jujur untuk negeri sendiri, kapan lagi buat hidup lebih berarti, laporkan terus terang yang sebenarnya, jangan ragu, jangan bimbang, ungkap tebus lega.

Petikan Jingle Amnesti Pajak.

Bocah kelas 5 sekolah dasar itu tersenyum senang saat mendapat gitar pertamanya. Sebuah gitar hadiah sang kakak setelah menjalani prosesi sunat. Ia pun berjanji untuk mempelajari cara bermain gitar. Hampir setiap bulan sang bocah mampu menguasai satu buah lagu. Berbekal *Music Book Selection* (panduan lagu-lagu dan kord gitar terkini), lambat laun kemampuannya bermain gitar semakin mumpuni. Di antara teman-teman sebayanya, kemampuan sang bocah bermain gitar membuatnya terlihat 'keren'.

Kini, bocah kecil itu tumbuh dewasa dengan kemampuan memainkan berbagai alat musik. Ia pun menjajal *keyboard*, *drum*, bahkan sempat mengeluarkan *single* dan mahir mengaransemen lagu. Ialah Febri Noviardi, sosok dibalik pencipta *jingle* lagu Amnesti Pajak. Ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Febri, sapaan akrabnya, menemui Media Keuangan dengan ramah. Pria 28 tahun ini menceritakan kegemarannya bermusik hingga harapannya terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Belajar otodidak

Bakat memang tak sepenuhnya berperan penting dalam kehidupan manusia. Bila bakat tak diasah, maka kemampuan bawaan manusia tersebut tak akan pernah menjadi unggul.

Begitulah yang dialami Febri. Kemampuan bermusik yang dimilikinya saat ini merupakan hasil kerja keras. Kecintaannya pada gitar membuatnya belajar memainkan kord-kord gitar secara otodidak. Begitu juga saat Febri ingin mendalami *drum*, seringkali ia mampir sejenak bersama teman-teman di sebuah studio musik sesuai kuliah. "Waktu kuliah, saya seperti musisi 'gampang', sering diajak main ke grup *band* ini sebagai *keyboardist*, lalu *band* yang lain sebagai gitaris. Tapi saat itu, saya sangat menikmati," ujar lulusan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini sembari tertawa.

Hingga akhirnya sebuah protes datang dari sang Ayah. "Kamu percuma bisa *main* macam-macam alat musik kalau *nggak bisa nyanyi*," ujar Ayah Febri kala itu. Pernyataan itu justru membuat pria kelahiran Jakarta, 23 November 1988

ini tertantang. Mulanya Febri memang merasa tak memiliki bakat menyanyi. Dengan tekad untuk membuktikan tantangan sang ayah, Febri mempelajari teknik dasar vokal dan cara melakukan improvisasi melalui Youtube. Kala itu, ia menginjak semester 3 perkuliahan.

Tak sia-sia kerja keras Febri berlatih menyanyi setiap hari. Hingga suatu hari ada seorang Youtuber (pemilik akun Youtube) yang telah memiliki banyak *subscriber* berkata "Lo sebenarnya bisa *nyanyi*, ayo ikut *gue nyanyi*," ujarnya saat mendengar suara Febri saat bernyanyi. Saat itulah Febri pertama kali bernyanyi melalui Youtube melalui kolaborasi dengan rekan tersebut. Tak disangka, antusiasme *viewer* (penonton video) kolaborasi Febri pun sangat menggembirakan. "Waktu itu saya menyanyikan lagu Raisa – Apalah Arti Menunggu," kenangnya.

Setelah beberapa video yang diluncurkan di Youtube mendapat apresiasi bagus dari *viewer*, tawaran kontrak dari beberapa label rekaman pun datang. Sebuah perusahaan rekaman ternama di Indonesia menawarkan kepada Febri untuk membuat *single* lagu dengan format trio. Namun Febri menolak, ia memilih format duo. Pada tahun 2013, *single* pertama Febri bersama rekan duonya diluncurkan dengan judul "Di Hatimu Ku Ini Siapa." *Single* kedua diluncurkan pada tahun 2015 dengan judul "Jalan-Jalan Lagi."

Kala itu, industri musik kurang mendukung *genre* musik mereka. Febri mengakui, kesibukan sebagai pegawai DJP juga cukup menguras fokusnya untuk bermusik. Semangat tinggi untuk mengembangkan karier sebagai musisi pun lambat laun menurun. Bagi Febri,

musik adalah warna jiwanya, namun tidak menjadi pilihan karier.

Ada satu cerita menarik dari proses seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan yang dijalani Febri pada tahun 2013. Saat proses pemberkasan dokumen, salah satu panitia seleksi mengenali wajahnya. Beberapa hari kemudian, saat kembali bertemu Febri, panitia tersebut berujar, "Saya tahu kamu. Saya mengoleksi video-video Youtube kamu lebih dari tiga." Mendengar hal itu, Febri pun tercengang.

Pada tahun 2014, Febri mampu menjalani ujian dengan baik dan berhasil lolos sebagai CPNS Kementerian Keuangan. Saat orientasi seluruh pegawai baru di Istora Senayan, ia diminta sebagai perwakilan DJP dalam prosesi penyematan. Di luar perkiraan, lulusan SMA Negeri 68 Jakarta ini juga diminta menyanyi di depan 5000 lebih CPNS Kementerian Keuangan. "Waktu itu saya menyadari kurangnya persiapan. Waktu disuruh menyanyi, ya sudah 'hajar' saja," ujarnya. Suatu pengalaman mengesankan bagi Febri di langkah awalnya sebagai abdi negara.

Setelah mengawali tugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sawah Besar I, kemudian berlanjut ke KPP Pratama Pademangan, akhirnya Febri bergabung di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP. Saat masih mengemban amanah di KPP Pademangan itulah Febri mengikuti lomba kreatif yang diadakan oleh Kantor Pusat DJP. *Jingle* "DJP Bisa" yang diciptakan dan diaransemen sendiri akhirnya keluar sebagai pemenang. Pada tahun 2016, Febri kembali mendapat tugas kehormatan untuk menciptakan *jingle* mengenai Amnesti Pajak.

Lahirnya *jingle* Amnesti Pajak

Dalam proses penciptaan *jingle* Amnesti Pajak ini, Febri harus melalui sebuah *workshop* bersama tim kreatif DJP lainnya. Bersama dengan para komikus, *video maker*, dan *graphic designer*, Febri terus mencari inspirasi untuk lagu yang akan diciptakannya. "Saya ingin bikin lirik yang *simple*, masyarakat bisa terus terngiang dan tidak sulit menangkap lagu ini," jelas suami dari Dian EP ini. Bisa dikatakan, *jingle* Amnesti Pajak itu sungguh ajaib. Hampir seluruh proses penciptaannya dilakukan oleh Febri seorang diri. Mulai dari menciptakan lirik, mengaransemen lagu, memainkan gitar, bas, *keyboard*, hingga saat menyanyikan lagunya. "Kecuali *drum*, ada satu teman membantu sebagai *drummer*. Jadi di studio kami mengerjakan berdua," katanya.

Febri berharap, ke depan Kementerian Keuangan bisa memiliki lagu-lagu yang sederhana dan mengena di hati masyarakat. Mengingat sosialisasi dalam bentuk *jingle* atau lagu terbukti efektif dalam menyebarkan kebijakan pemerintah. "Saya senang bisa menciptakan lagu bertema Indonesia," ungkapnya. Bahkan beberapa rekan Febri di luar Kementerian Keuangan tak sedikit yang memuji *jingle* Amnesti Pajak layaknya lagu pop masa kini.

"Saya juga berharap tim kreatif ini bisa memiliki divisi sendiri layaknya pegawai fungsional. Menurut saya, membuat karya itu tidaklah mudah. Perlu keahlian khusus, pengalaman, dan butuh *effort* yang lebih," ujarnya. Lebih jauh, Febri juga bermimpi suatu saat Kementerian Keuangan memiliki *management label* sendiri yang mampu mencari bakat-bakat terpendam seluruh pegawai dari Sabang hingga Merauke.

Teks Pradany Hayyu

Menambah Makna dalam Kehidupan

Foto gratisography.com

Mendapat kabar duka sama sekali bukan hal yang menyenangkan. Ditinggal pergi oleh orang yang disayang juga, memberikan duka dan kesedihan mendalam. Namun, datangnya ajal tidak mungkin ditawar. Kematian menjadi hal yang pasti, sekalipun bagi seseorang yang dermawan. Setiap yang berjiwa pasti akan mendapatkan giliran.

Helaan napas kita bergulung dengan waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, dan bahkan tahun demi tahun. Kesibukan membuat kita tidak sadar bahwa semakin bertambah usia, semakin dekat pula kita dengan alam baka. Jika kita, manusia, mengimani bahwa kehidupan dunia kelak akan berakhir, rasanya tidak ada kekhawatiran kapan ajal itu tiba. Kecemasan timbul ketika kita tidak punya bekal amal yang cukup untuk

menyambutnya.

Ajal menjemput tanpa memikirkan keluarga dan harta yang ditinggalkan. Tidak ada lagi keistimewaan yang membedakan antara manusia yang satu dengan lainnya. Sendiri menuju kehidupan yang kekal berbekal amal kebajikan.

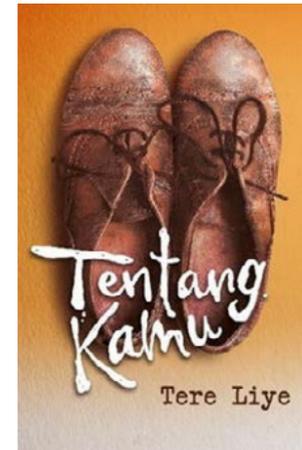
Manusia seringkali diingatkan untuk berbuat kebaikan, karena keseluruhan hidup ini adalah ibadah. Kita tidak lagi bisa berpikir parsial antara kehidupan di dunia dan akhirat. Keduanya menjadi hajat yang butuh diseimbangkan sesuai fitrah kehidupan manusia. Bisa jadi, tambahan usia hingga hari ini menjadi tidak berarti tanpa amalan yang baik dan bermanfaat. Sebab, hari esok belum tentu menjadi hak kita lagi.

Tidak ada satu orang pun yang dapat kembali ke masa lalu, mengulang jalan cerita yang baru, untuk lebih baik dari sebelumnya. Begitupun, tiada yang

dapat menambah usia demi kehidupan yang lebih bermakna. Kita hanya dapat menambahkan makna bagi kehidupan ini di sisa umur kita.

Ibadah adalah salah satu dimensi yang diperlukan untuk menambah makna hidup. Oleh karena itu, setiap aktivitas kita niatkan semata-mata sebagai wujud bakti kepada Sang Maha Pencipta. Tidak ada yang tahu, aktivitas yang sederhana sekalipun dapat menjadi amal kebajikan yang bermakna besar. Layaknya akar, meskipun tidak tampak, ia mampu mengokohkan sebuah batang pohon. Seutas akar tidak pernah mendapat pujian, tetapi kehadirannya sangat bermakna. Kiranya kita bisa memetik pelajaran dari seutas akar, sehingga kehidupan ini lebih bermakna.

Teks Titi Susanti



Judul : Tentang Kamu
Pengarang : Tere Liye
Penerbit : Republika
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : Oktober 2016
Deskripsi Fisik : 524 halaman
ISBN : 9786020822341

Peringkat Buku Fiksi Terpopuler

- **The Associate**
Oleh John Grisham
- **Tentang Kamu**
Oleh Tere Liye
- **Go Set a Watchman**
Oleh Harper Lee
- **Critical Eleven**
Oleh Ika Natassa

Peringkat Buku Non-Fiksi Torpuler

- **Catatan Najwa**
Oleh Najwa Shihab
- **Rahasia Ayah Edy Memetakan Potensi Unggul Anak**
Oleh Ayah Edy
- **Internal Control of Fixed Assets**
Oleh Alfred M. King
- **Statistik NonParametik**
Oleh Singgih Santoso

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

- Perpustakaan Kemenkeu
- Perpustakaan Kementerian Keuangan
- @kemenkeulib

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

Tentang Kamu: Makna Kehidupan dalam Misteri

Tere Liye kembali hadir membawa karya yang memesona. Pembaca akan dibuai dengan untaian kata yang membuat hanyut perasaan hingga akhir cerita. Novel “Tentang Kamu” ini membawa nuansa baru bagi dunia novel romansa. Kali ini penulis mengambil alur cerita terbalik (*flashback*). Banyak kisah disampaikan dari masa lalu tokoh utama, Sri Ningsih, seorang perempuan pemegang paspor Inggris yang telah menghembuskan nafas terakhir di sebuah panti jompo di Paris. Perempuan tua itu mewariskan harta demikan banyaknya, bahkan mampu menyaingi kekayaan Ratu Inggris.

Teka-teki penyelesaian harta warisan yang amat pelik sekaligus menarik dimulai dengan hadirnya Zaman Zulkarnaen, seorang pengacara lulusan master hukum dari Oxford University. Zaman bekerja sebagai *junior associate* di sebuah firma hukum ternama di Belgrave Square, London. Untuk memahami kasus tersebut, Zaman memulai dengan menelusuri kisah hidup Sri Ningsih sejak masa kecil hingga dewasa kemudian wafat. Sri Ningsih diketahui menghabiskan masa kecil dan tumbuh besar di Sumbawa, kemudian ia mengadu nasib dan mendirikan perusahaan di Jakarta. Setelah itu, Sri Ningsih kembali ke kota Surakarta untuk belajar di sebuah pondok pesantren, hingga kemudian melabuhkan tambatan cintanya di London. Pada akhirnya, takdir menuntun akhir hidupnya di Paris.

Salah satu kekuatan cerita novel ini terletak dari rekonstruksi kisah hidup Sri Ningsih dengan berbekal 20 surat dari kerabat di Surakarta. Zaman merekonstruksi surat-surat tersebut, menjadikannya alur untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Walaupun terkesan monoton karena hanya berisi narasi surat, Tere Liye berhasil menghidupkan alur cerita dengan *gimmick* kisah percintaan dan persahabatan Sri Ningsih selama hidupnya.

Bagi Sri Ningsih, tiga negara dan lima kota mampu menyisakan beribu luka. Pada akhirnya, Zaman mampu menarik benang merah dalam napak tilas kehidupan wanita kaya tersebut. Zaman seolah hanyut dalam gelombang perjalanan hidup Sri Ningsih yang tak mudah. Aliran emosi yang dialami Zaman inilah yang ditangkap pembaca. Seolah-olah pembaca bisa merasakan segala kecamuk rasa yang dialami Sri Ningsih.

Ilustrasi sampul novel yang diluncurkan pada Oktober 2016 lalu ini mampu menarik perhatian pembaca. Sepasang sepatu oxford lusuh, berwarna coklat dengan tali terurai, serta warna jingga menyala memberi kesan sederhana namun sarat makna. Satu kekurangan yang tampak dalam novel ini, yakni pengisahan sosok Zaman yang terlalu minim diungkap. Bagaimanapun juga, Zaman merupakan sosok brilian yang mampu menarik perhatian pembaca tanpa mengalihkan fokus pada kisah kehidupan Sri

Teks Krishna Pandu Pradana

Mencicip Kuliner Banjar Di Tepi Sungai

Selain kaya buah tropis, Banjarmasin juga memiliki aneka kuliner nikmat. Tentu soto Banjar yang kaya rempah ada di peringkat pertama. Dalam semangkuk soto Banjar, kita akan mendapati helaian bihun, potongan perkedel kentang, irisan telur rebus, suwiran daging ayam kampung, daun seledri, dan bawang goreng. Kuahnya bening, dimasak dengan merebus belasan jenis bumbu dapur dan kaldu ayam.



Suasana Jual beli di Pasar Terapung Sungai Barito, Banjarmasin.

Lontong Orari.

Soto Banjar.

Foto
Adhi Kurniawan

Puluhan perahu berdesakan di tepi sungai, membawa dagangan berupa sayur dan buah-buahan. Di tengah riuh rendah interaksi penjual dan pembeli, seorang nenek mengacungkan ibu jarinya di ujung perahu. Generasi yang tumbuh pada era 90-an, pasti akrab dengan iklan komersial sebuah televisi swasta itu. Pasar terapung yang merupakan ikon khas Banjarmasin digambarkan dengan apik dalam sketsa tersebut.

Dua dekade berselang, semarak pasar terapung masih bertahan. Setelah membelah aliran Sungai Martapura dengan menumpang *kelotok*, perahu kayu bermesin, saya sampai di Desa Lok Baintan. Kesibukan pasar terapung di sini sudah dimulai sejak subuh. Pedagang yang sebagian besar kaum ibu mendayung sampan dari desa-desa di daerah hulu menuju lokasi pasar. Komoditas dagangannya antara lain bahan makanan pokok, aneka kue tradisional, serta produk kerajinan tangan seperti topi dan tas anyaman serat lampit. Sebuah perahu

mendekat ke *kelotok* yang saya tumpangi. Sang penjual menawarkan beberapa jenis buah yang belum pernah saya temui. Saya tertarik dengan buah bulat berwarna kuning kecoklatan. Ukurannya sebesar bola tenis dan berkulit halus. "Ini buah kecapi, Nak. Buah asli sini," terang ibu penjual. Dia lantas mengambil satu buah dan mengupas kulitnya. "Coba dicicipi," ucapnya sambil mengangsurkan daging buah yang berwarna putih. Rasanya agak masam, tetapi segar di mulut.

Saya juga mencoba buah kasturi. Sekilas, buah ini mirip kedondong, tampak keras dengan kulit hijau kehitaman. Namun setelah dikupas ternyata daging buahnya lunak kekuningan seperti

mangga. Ada pula yang disebut buah mentega. Kulitnya berwarna merah dengan lapisan bulu halus berwarna putih. Sesuai namanya, daging buah ini memang empuk seperti mentega.

Selain kaya buah tropis, Banjarmasin juga memiliki aneka kuliner nikmat. Tentu soto Banjar yang kaya rempah ada di peringkat pertama. Dalam semangkuk soto Banjar, kita akan mendapati helaian bihun, potongan perkedel kentang, irisan telur rebus, suwiran daging ayam kampung, daun seledri, dan bawang goreng. Kuahnya bening, dimasak dengan merebus belasan jenis bumbu dapur dan kaldu ayam.

Jika lazimnya soto disajikan bersama nasi putih, soto Banjar biasa dimakan bersama potongan ketupat. Kucuran jeruk nipis dan sambal bajak pedas membuat kenikmatan soto makin paripurna. Kedai soto yang sering menjadi buruan adalah Soto Bang Amat yang berada di tepi Sungai Martapura. Sambil bersantap, pengunjung bisa menikmati suasana sungai yang

menjadi urat nadi kota Banjarmasin.

Penjelajahan kuliner di Banjarmasin saya akhiri di kedai Lontong Orari. Dinamakan demikian karena kedai yang berdiri sejak tahun 1983 ini sering menjadi tempat *rendezvous* penggiat radio yang tergabung dalam Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari). Penataan kedai yang menempati bangunan rumah tinggal membuat pengunjung betah untuk makan bersama.

Menu yang ditawarkan kedai ini sederhana saja yakni lontong, sayur angka, serta pilihan lauk berupa ikan haruan, ayam, atau telur itik. Ketiga lauk dimasak habang atau diolah hingga berwarna kemerahan dengan bumbu utama berupa cabai kering, bawang merah, dan bawang putih. Lontong kemudian disajikan dengan siraman kuah santan yang kental dan gurih. Untuk sementara lupakan soal kolesterol jika ingin menikmati kuliner ini dengan hati tenang.

Teks Adhi Kurniawan



Berawal Dari Tulisan, Kini Jadi Penghasilan

Foto
Dok. Pribadi

Mengawali karier sebagai seorang *blogger*, Agus Mulyadi yang juga dikenal sebagai Gus Mul mengembangkan kariernya menjadi penulis buku, *freelance designer*, instruktur menulis kreatif, hingga redaktur konten pada suatu situs berita. Agus merupakan *blogger* yang dikenal senang memberi selipan geyongan dan bahasa Jawa dalam setiap tulisannya. Alasannya sederhana, ia ingin menyampaikan bahasa tulisannya dengan gaya yang lebih santai agar bisa diterima oleh semua kalangan pembaca. Ia berharap dengan tulisannya, ia memiliki kesempatan untuk memasukkan unsur-unsur yang mendidik tanpa terkesan menggurui kepada pembacanya.

Tahun 2009 Agus memulai hobi menulis dengan menggunakan blog anonim. Ia mengisi blognya dengan tulisan 'gado-gado' dan gaya bahasa yang kaku. Tahun 2012 ia beralih menulis dengan gaya bahasa yang santai dan humoris. Tema yang diangkat juga beralih ke tema keseharian. Tak disangka, gaya bahasanya itu justru menarik banyak pengunjung ke blognya. Melalui blognya, Agus pernah diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar atau *workshop* pelatihan menulis. Selain itu, ia juga pernah menjadi pembicara pada beberapa stasiun televisi.

Menurutnya, kunci keberhasilannya adalah dengan konsisten menulis. Dengan begitu, kemampuan menulisnya akan terus terasah. Untuk menggali inspirasi, ia mengaku memperoleh banyak ide jenaka dari teman-teman dan keluarganya. Berkat tulisannya yang bernas dan lucu, Agus pun berhasil memenangkan berbagai macam lomba menulis blog. Bahkan, pada tahun 2013, ia ditawarkan untuk menerbitkan

hasil tulisan-tulisannya menjadi buku. Sampai saat ini, ada tiga buku yang sudah ia terbitkan, yaitu "Jomblo tapi Hafal Pancasila", "Bergumul Dengan Gusmul", dan "Diplomat Kenangan".

Dalam wawancara dengan Media Keuangan, Agus menceritakan kisah menariknya ketika ia menjadi narasumber pada situs Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Yogyakarta. Ia diminta untuk berbicara terkait konten digital, sehingga ia mengira pesertanya adalah para admin situs. Agus pun datang hanya bermodal sandal jepit, kaos *oblong*, dan celana *training*. Namun, ia baru sadar ternyata pesertanya adalah para pejabat tinggi. Ia pun sempat ditahan beberapa menit. Lain cerita, ia juga pernah mengisi *workshop* di Universitas Islam Indonesia. Agus memang terbiasa menjelaskan sesuatu dengan istilah bahasa Jawa. Setelah setengah jam berbicara, ia merasa heran karena seluruh peserta terlihat diam dan tidak merespons materinya. Belakangan ia baru sadar, ternyata dari sekitar 50 peserta yang mengikuti seminar, hanya empat orang yang *mudeng* bahasa Jawa.

Teks Abdul Aziz



Lapor SPT Lebih Awal, Lebih Nyaman.

Lapor SPT Tahunan bisa dilakukan sejak bulan Januari. Demi kenyamanan Anda, gunakan e-filing dan lapor lebih awal.

djponline.pajak.go.id



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

**MEMPERINGATI HARI RAYA NYEPI
TAHUN BARU SAKA 1939**



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**